

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Retno Puspito Sari

No. Mahasiswa: 18312004

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di sebuah perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup untuk menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Sleman, 1 Agustus 2022

Penulis



Retno Puspito Sari

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama: Retno Puspito Sari

No. Mahasiswa: 18312004

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Agustus 2022

Dosen Pembimbing,



(Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com.(SI), Ph.D.)

## BERITA ACARA

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

#### SKRIPSI BERJUDUL

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Disusun oleh : RETNO PUSPITO SARI

Nomor Mahasiswa : 18312004

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Kamis, 08 September 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D.,  
CFra.

Penguji : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra, CertIPSAS.

## MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

*Q.S Al-Insyirah: 60*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**”.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1) dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia. Selama proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan segala pihak. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala petunjuk, pertolongan, berkah, dan karunianya selama ini sehingga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi.
2. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu menyemangati, dukungan, dan motivasi tanpa lelah serta doa selama ini.
3. Kakak dan adik penulis yang turut memberikan dukungan dan informasi selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com.(SI), Ph.D., selaku Kepala Jurusan Akuntansi dan dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas

kesediaan waktu dan tenaga, arahan, dan pelajaran hidup yang telah bapak berikan kepada penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini.

7. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika beserta seluruh jajaran civitas Program Studi Akuntansi.
8. Aparat Desa yang berada di Kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi responden penelitian ini. Tanpa bantuan jajaran aparat desa skripsi ini tidak dapat dilakukan secara lancar.
9. Sahabat-sahabat penulis sejak bangku SMA, Zahra, Nasya, Isna, Lina, Aqila, dan Dita yang sama-sama sedang berkutat dengan skripsi namun tetap saling mendukung dan menjadi *support system* yang baik.
10. Sahabat penulis selama perkuliahan, Femi, Anggi, Bella, dan Hani yang selalu membantu selama masa perkuliahan.
11. Rintan Falah Ispridevi, teman penulis yang selalu mendukung dan memberikan *tips and trick* pengerjaan skripsi disela-sela mengerjakan thesis yang padat.
12. Teman-teman LPM Ekonomika yang telah mau menerima penulis selama ini dan memberikan banyak ilmu terkait kepenulisan.
13. Teman-teman Akuntansi 2018 yang telah bersama-sama sejak menjadi mahasiswa baru dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis merasa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan sehingga kritik dan saran sangat membantu untuk menyempurnakan penelitian ini.

Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut Terakhir, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Sleman, 1 Agustus 2022

Penulis,

Rerno Puspito Sari





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	8
1. 3 Batasan Masalah.....	9
1. 4 Tujuan.....	9
1. 5 Manfaat Penelitian.....	10
1. 6 Sistematika Penelitian .....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Stewardship Theory .....	12
2.1.2 Desa.....	13
2.1.3 Dana Desa .....	13
2.1.4 Akuntabilitas Dana Desa.....	15
2.2 Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	17
2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	17

2.2.2	Sistem Pengendalian Internal .....	18
2.2.3	Implementasi SISKEUDES .....	19
2.2.4	Penyajian Laporan Keuangan .....	20
2.2.5	Tingkat Pendidikan .....	21
2.3	Penelitian Terdahulu.....	22
2.4	Hipotesis .....	28
2.4.1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas .....	28
2.4.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas ....	29
2.4.3	Pengaruh Implementasi SISKEUDES terhadap Akuntabilitas .....	30
2.4.4	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas ....	31
2.4.5	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dalam Memperkuat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas .....	32
2.5	Model Penelitian.....	32
BAB III .....		34
METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Metodologi Penelitian .....	34
3.2	Populasi dan Sampel .....	34
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	35
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	36
3.4.1	Akuntabilitas Dana Desa.....	36
3.4.2	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	37
3.4.3	Sistem Pengendalian Internal.....	39
3.4.4	Implementasi SISKEUDES .....	41
3.4.5	Penyajian Laporan Keuangan .....	42
3.4.6	Tingkat pendidikan.....	43
3.5	Metode Analisis.....	44
3.5.1	Uji Validitas .....	44
3.5.2	Uji Reliabilitas .....	45
3.5.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	45
3.5.4	Uji Hipotesis .....	45
3.5.5	Uji Goodness of Fit .....	46
BAB IV .....		47

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
4.1  Proses dan Hasil Pengumpulan Data .....	47
4.2  Deskripsi Responden .....	48
4.2.1.  Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	48
4.2.2.  Klasifikasi Responden Menurut Usia .....	48
4.2.3.  Klasifikasi Responden Menurut Pendidikan Terakhir .....	49
4.2.4.  Klasifikasi Responden Menurut Jabatan .....	50
4.2.5.  Klasifikasi Responden Menurut Lama Menjabat .....	50
4.2.6.  Klasifikasi Responden Menurut Kelurahan .....	51
4.2.7.  Klasifikasi Responden Menurut Kecamatan .....	53
4.3  Analisis Statistik Deskriptif .....	53
4.4  Uji Instrumen Penelitian .....	55
4.4.1  Uji Validitas .....	55
4.4.1.1  Validitas Konvergen .....	55
4.4.1.2  Validitas Diskriminan .....	57
4.4.2  Uji Reliabilitas .....	60
4.5  Menilai Model Structural ( <i>Inner model</i> ) .....	61
4.6  Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	61
4.7  Uji Hipotesis Dan Pembahasan .....	62
4.7.1  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas .....	63
4.7.2  Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas ...	64
4.7.3  Pengaruh Implementasi SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas .....	65
4.7.4  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas ...	66
4.7.5  Pengaruh Tingkat Pendidikan dalam Menguatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas .....	67
BAB V .....	70
PENUTUP .....	70
5.1  Kesimpulan .....	70
5.2  Kontribusi dan Implikasi Penelitian .....	71
5.2.1  Kontribusi Penelitian .....	71
5.2.2  Implikasi Penelitian .....	71
5.3  Keterbatasan Penelitian .....	72

5.4	Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN.....	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian ..... 33



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b> Penelitian Terdahulu.....	22
<b>Tabel 3. 1</b> Indikator Akuntabilitas.....	37
<b>Tabel 3. 2</b> Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	38
<b>Tabel 3. 3</b> Indikator Sistem Pengendalian Internal .....	40
<b>Tabel 3. 4</b> Indikator Kompetensi Implementasi SISKEUDES.....	41
<b>Tabel 3. 5</b> Indikator Penyajian Laporan Keuangan .....	43
<b>Tabel 4. 1</b> Hasil Kuesioner .....	47
<b>Tabel 4. 2</b> Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	48
<b>Tabel 4. 3</b> Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	48
<b>Tabel 4. 4</b> Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	49
<b>Tabel 4. 5</b> Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan .....	50
<b>Tabel 4. 6</b> Penggolongan Responden Menurut Lama Jabatan .....	50
<b>Tabel 4. 7</b> Daftar Kelurahan Subyek Penelitian .....	51
<b>Tabel 4. 8</b> Klasifikasi Responden Menurut Kecamatan .....	53
<b>Tabel 4. 9</b> Statistik Deskriptif.....	53
<b>Tabel 4. 10</b> Nilai Outer Loading dan AVE.....	56
<b>Tabel 4. 11</b> Nilai Cross Loading.....	58
<b>Tabel 4. 12</b> Nilai HTMT.....	59
<b>Tabel 4. 13</b> Pengujian Reliabilitas .....	60
<b>Tabel 4. 14</b> Pengujian Koefisien Determinasi.....	61
<b>Tabel 4. 15</b> Pengujian Hipotesis.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	80
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	86
Lampiran 3 Data Responden Variabel Akuntabilitas.....	87
Lampiran 4 Data Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	91
Lampiran 5 Data Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	95
Lampiran 6 Data Responden Variabel Implementasi SISKEUDES.....	99
Lampiran 7 Data Responden Variabel Penyajian Laporan Keuangan Dan Tingkat Pendidikan.....	103
Lampiran 8 Klasifikasi Data.....	107
Lampiran 9 Statistik Deskriptif.....	111
Lampiran 10 Gambar Pengujian.....	115



## ABSTRACT

*Village funds transferred from the APBN to village accounts always increase every year. However, cases of misappropriation of village funds occurred in several areas. This study aims to analyze the effect of village apparatus competency, internal control, implementation of village financial system (SISKEUDES), and financial statement presentation with educational level as a moderating on the accountability of village fund management. This study used purposive sampling to collect the data and Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM) to analyze data. The result showed that the village apparatus competency and internal control had a significantly positive effect on the accountability of village fund management. However, the implementation of SISKEUDES and financial statement presentation had no effect on accountability of village fund management. The level of education did not strengthen the influence of village apparatus competency on the accountability village fund management.*

**Keywords:** *Village fund management, accountability, competency, internal control, SISKEUDES, financial statement presentation*

## ABSTRAK

Dana desa yang ditransfer dari APBN ke rekening desa tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun kasus penyelewengan dana desa terjadi di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, implementasi Sistem Keuangan Desa, dan penyajian laporan keuangan dengan tingkat pendidikan sebagai variabel pemoderasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan *Partial Least Square-Structural Equation Model* (PLS-SEM) sebagai metode analisis data. Responden terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan yang berjumlah 159 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penyajian laporan keuangan dan Implementasi SISKEUDES tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel pemoderasi yakni tingkat pendidikan tidak menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** Pengelolaan dana desa, akuntabilitas, kompetensi, sistem pengendalian internal, SISKEUDES, penyajian laporan keuangan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan akan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan keterbukaan informasi seiring dengan perkembangan sektor publik (Mardiasmo, 2018). Tuntutan ini ditujukan dalam rangka penunaian hak-hak masyarakat. Selain itu, akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan sebagai salah satu tonggak dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Puspa dan Prasetyo, 2020). Akuntabilitas pemerintah dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan pemerintah (Savitri *et al.*, 2020).

Akuntabilitas menjadi tuntutan yang perlu diprioritaskan dalam sektor publik oleh pemerintah desa karena menyangkut kewajiban pemerintah desa dalam mengelola anggaran (Luthfiani *et al.*, 2020). Menurut Permedagri No 20 Tahun 2018, dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin pada anggaran. Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 hadir sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam mengelola asset kekayaan daerah sesuai dengan kondisi sosial dan budayanya, termasuk dalam pengelolaan keuangan (Sapartiningsih *et al.*, 2018). Perwujudan desentralisasi tidak hanya dalam hierarki pemerintahan saja, tetapi juga dalam desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat ke daerah baik kabupaten/kota maupun

desa. Akuntabilitas dana desa dituntut sebagai konsekuensi atas desentralisasi fiskal pelaksanaan otonomi daerah (Triyono *et al.*, 2019).

Akuntabilitas dalam laporan keuangan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai akuntabilitas keuangan saja, namun juga akuntabilitas *value for money*, manajerial, hukum, dan politik (Mardiasmo, 2018). Informasi atas segala aktivitas maupun kinerja finansial pemerintah harus diungkapkan melalui laporan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Aparat desa sebagai pengurus yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai prinsipal, bertanggung jawab atas proses pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana desa (Hardiningsih *et al.*, 2020).

Dana desa hadir sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada desa sebagai subjek pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa didefinisikan sebagai dana yang diperuntukkan untuk mendanai segala kegiatan pemerintahan, proyek pembangunan, menanggung kegiatan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa yang dianggarkan dari APBN setiap tahunnya merupakan salah satu sumber pendapatan desa di samping pendapatan yang diperoleh desa lainnya.

Hingga tahun 2021 jumlah dana desa yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp400,1 triliun (Ramadhan, 2021). Dengan rincian yang dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), awal 2015 dana desa pertama kali dikeluarkan sebesar Rp20,8 triliun. Tahun 2016 dianggarkan

sebesar 46,98 triliun dan 2017 sebesar Rp60 triliun. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp60 triliun dan 2019 sebesar Rp70 triliun (Ardianti dan Suartana, 2020). Pada tahun 2020 dan 2021 dana desa dianggarkan sebesar Rp72 triliun. Kemudian data terbaru, tahun 2022 sebesar Rp68 triliun (Kemenkeu, 2022). Terdapat kecenderungan kenaikan anggaran dana desa sejak tahun 2015.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Pembangunan Desa milik Kementerian Desa, capaian dana desa pada tahun 2015-2018 telah berkontribusi membangun 191.600 km jalan desa, 5.371 tambatan perahu, 4.175 unit embung, 8.983 unit pasar desa, 240.587 unit MCK, 58,931 unit saluran irigasi, dan sebagainya. Sedangkan pada tahun 2019, capaian dana desa telah berhasil menyokong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa capaian berikut meliputi pembangunan 40.109 km jalan desa, 1.497 unit pasar desa, 6.695 saluran irigasi, 99.322 unit MCK, 941 unit tambatan perahu, 664 unit embung, dan sebagainya (Kemendes, 2019).

Dengan besaran dana desa yang cukup besar tersebut berakibat pada potensi penyelewengan dana (Ardianti dan Suartana, 2020). Hal ini senada dengan kasus yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kepala desa seringkali menjadi salah satu pihak yang menyelewengkan dana desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan sepanjang 2015-2018 telah ditemukan kasus korupsi anggaran desa sebanyak 252 kasus (Abdi, 2019). Secara terperinci, pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, tahun 2016 terdapat 48 kasus, tahun 2017 terdapat 98 kasus dan 2018 terdapat 96 kasus. Selain itu, ICW melaporkan terdapat lonjakan jumlah kasus

korupsi dana desa (Aji, 2019). Pada 2016-2017 sebanyak 110 kepala desa yang menjadi tersangka dan tahun 2018 sebanyak 102 orang.

Modus yang dijadikan dalih korupsi antara lain melebihi-lebihkan biaya dari harga pasar, adanya individu yang memotong dana dan meminjam tanpa mengembalikan, *markup* honor, pajak tidak setor, dan inventaris digunakan untuk keuntungan pribadi (Puspa dan Prasetyo, 2020). Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan menerangkan terbatasnya pengetahuan aparat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan berpotensi menyebabkan adanya penyelewengan ataupun korupsi (Abidin, 2015). Hal tersebut, menunjukkan bahwa dana desa masih jauh dari tujuan dianggarkan yakni untuk memajukan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan seperti yang tertera dalam undang-undang.

Pemahaman terkait cara meningkatkan akuntabilitas sektor publik menjamin terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang baik pula (Aziz *et al.*, 2015). Penelitian terkait dana desa masih menarik untuk diteliti kembali mengingat dana yang dikucurkan untuk tiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan melalui lima tahapan pengelolaan dana desa saja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti, penyajian dan aksesabilitas laporan keuangan, peran aparat desa, integritas, *leadership*, sistem pengendalian internal, kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kompetensi sumber daya manusia, dan SISKEUDES.

Penelitian terkait dana desa telah banyak diteliti menggunakan teori seperti *Stewardship*, *Stakeholder*, dan institusional. Teori *Stewardship* telah digunakan pada penelitian oleh (Bawono *et al.*, 2020; Hardiningsih *et al.*, 2020; Puspa dan Prasetyo, 2020; Savitri *et al.*, 2020; Triyono *et al.*, 2019). Teori *Stakeholder* digunakan pada penelitian Said dan Alam (2018). Serta teori institusional digunakan pada penelitian Tran *et al.* (2021). Dengan demikian, studi ini ditujukan untuk menentukan dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, implementasi SISKEUDES, dan penyajian laporan keuangan. Tingkat pendidikan digunakan untuk memoderasi faktor kompetensi sumber daya manusia.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang mendorong pemenuhan akuntabilitas secara keseluruhan mengingat kompetensi dianggap sebagai faktor internal dan membentuk kinerja menjadi lebih baik (Hardiningsih *et al.*, 2020). Kompetensi mencakup beberapa aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki seseorang (Puspa dan Prasetyo, 2020). Kompetensi tidak serta merta terbentuk begitu saja, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti tingkat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang tampak saat aparat desa menjalankan tugasnya (Sapartiningsih *et al.*, 2018).

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan akuntabilitas. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Dengan adanya sistem pengendalian internal

diharapkan pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan (Yesinia *et al.*, 2018). Adanya penekanan pengendalian pada setiap kegiatan dan aktivitas melalui undang-undang, peraturan, dan prosedur akan menjamin pertumbuhan akuntabilitas di sektor publik (Alam *et al.*, 2019). Hadirnya sistem ini tidak hanya untuk memenuhi mekanisme administratif namun juga sebagai upaya membentuk perubahan sikap dan perilaku pemerintah desa (Arfiansyah, 2020). Sistem pengendalian internal yang layak diperlukan untuk mencegah dan melindungi pengelolaan dana desa dari kecurangan (Wahyudi *et al.*, 2022).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi administrasi dalam rangka melaksanakan tanggungjawab pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini mulai dikenalkan tahun 2015. Tuntutan akan reformasi sistem keuangan merupakan bagian dari upaya perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi transparan (Mardiasmo, 2018). Penerapan SISKEUDES di pemerintah desa akan mendorong terwujudnya akuntabilitas dan memperlancar kinerja pemerintah desa seperti proses pelaporan. Pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi dapat meminimalisasi kecurangan (Arfiansyah, 2020). Hal ini serupa dengan studi sebelumnya yang menerangkan SISKEUDES memberikan pengaruh positif dalam perwujudan akuntabilitas dana desa (Bawono *et al.*, 2020).

Penyajian laporan keuangan menjadi aspek penting akuntabilitas pengelolaan dana desa (Triyono *et al.*, 2019). Pemerintah desa bertanggung jawab dalam melaporkan realisasi dana desa kepada Bupati atau Walikota. Hal ini

berimplikasi pada kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Arfiansyah, 2020). Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel jika memenuhi standar akuntansi yang disepakati di Indonesia dan memenuhi aspek kualitatif laporan keuangan (Triyono *et al.*, 2019). Nordiawan dan Hertianti (2018) menerangkan laporan keuangan di sektor publik mempunyai peran krusial dalam mewujudkan akuntabilitas. Tidak hanya itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

Tingkat pendidikan aparat desa yang rendah menyebabkan pengelolaan anggaran dana desa tidak maksimal (Murina dan Rahmawaty, 2017). Pada studi tersebut juga dipaparkan bahwa tingkat pendidikan aparat desa berpengaruh dalam memahami laporan keuangan. Hardiningsih *et al.* (2020) menyatakan kompetensi yang didukung dengan tingkat pendidikan yang sesuai akan membantu perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa di setiap tahapannya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, aparat desa dapat dengan mudah memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku terutama peraturan terkait pengelolaan dana desa (Cahyani *et al.*, 2019). Tingkat pendidikan menguatkan pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengalokasian dana desa (Hardiningsih *et al.*, 2020).

Dalam penelitian sebelumnya, jarang ditemukan tingkat pendidikan digunakan sebagai *moderating variable*. Penelitian terdahulu hanya sebatas menguji hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa kajian penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi dalam analisa faktor kompetensi sumber daya manusia,

implementasi SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal, dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 desa. Pada tahun 2022, Kabupaten Sleman mendapatkan transfer dana desa sejumlah Rp105.499.075. Nominal yang cukup besar dan menempatkan Kabupaten Sleman berada di posisi kedua terbesar jumlah transfer dana desa di Provinsi Yogyakarta. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa perlu menjadi perhatian. Hal tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah terdapat pengaruh implementasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah tingkat pendidikan menguatkan pengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?



### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk menghindari kesalahpahaman makna maupun penafsiran, peneliti menetapkan batasan penelitian yakni studi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai berikut, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, implementasi SISKEUDES, dan penyajian laporan keuangan desa. Penelitian ini terbatas pada lingkup desa di Kabupaten Sleman.

### **1.4 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk.

1. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui pengaruh implementasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Mengetahui bahwa tingkat pendidikan menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat untuk berbagai pihak antara lain sebagai berikut.

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dana desa. Selain itu, studi ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat praktis**

Selain memberikan manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ranah praktis yakni pemerintah baik tingkat pusat maupun desa.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab adalah sebagai berikut.

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori, kajian pustaka, kerangka penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka model penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, pengukuran variabel, dan metode analisa data yang digunakan.

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan diskripsi responden, pengolahan, dan analisis data dalam rangka pengujian hipotesis, serta membahas dan mendiskusikan mengenai hasil uji hipotesis penelitian tersebut.

#### BAB V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis di bab sebelumnya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Stewardship Theory

Teori *Stewardship* mengidentifikasi situasi di mana manajer tidak termotivasi oleh tujuan pribadi, melainkan berfokus sebagai *steward* (pelayan) yang memiliki motif sejalan dengan tujuan prinsipal (masyarakat) mereka (Donaldson dan Davis, 1997). Dalam studi yang sama juga dijelaskan bahwa perilaku seorang *steward* diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai perilaku kolektivistik pro-organisasi lebih tinggi daripada memenuhi kepentingan dirinya sendiri.

Pemerintah sebagai *steward* mempunyai peran untuk memaksimalkan fungsi utilitas masyarakat dengan membuat regulasi untuk melindungi dan mengelola aset dan keuangan (Bawono *et al.*, 2020). Selain itu, dalam teori *Stewardship*, pemerintah desa sebagai *steward* dituntut untuk mengimplementasikan *good government governance* yang salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Puspa dan Prasetyo, 2020). Semakin kompleksnya transaksi dalam akuntansi diiringi dengan peningkatan tuntutan akan akuntabilitas, semakin sulit untuk prinsipal (masyarakat) untuk menjalankan fungsi manajemen. Kemudian masyarakat mempercayakan kepada pemerintah desa sebagai *steward* untuk mengurus sumber daya tersebut. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat tersebut didasari adanya kepercayaan untuk bertindak secara kolektif mencapai tujuan organisasi (Savitri *et al.*, 2020).

### 2.1.2 Desa

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

mendefinisikan desa sebagai berikut.

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan kehadiran UU tersebut sekaligus melegitimasi kedudukan desa sebagai salah satu subyek pembangunan yang mana disebutkan dalam UU No 6 tahun 2014. Desa menjadi salah satu proyek prioritas sesuai Nawacita pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran (Arfiansyah, 2020). Secara langsung hal tersebut menggeser tata kelola dari pemerintah pusat ke daerah tersebut. Adapun tujuan dari pengaturan desa ini tertera pada pasal 4 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* antara lain sebagai berikut, memberikan pengakuan atas keberagaman desa yang sudah ada sebelumnya, memobilisasi prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa, menciptakan pemerintahan desa yang professional dan bertanggungjawab, dan sebagainya.

### 2.1.3 Dana Desa

Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didefinisikan sebagai berikut.

“Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2016 pasal lima, anggaran dana desa setiap provinsi yang bersumber dari APBN dialokasikan berdasar pada jumlah desa yang bersangkutan serta jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa yang akan disalurkan ke pemerintah desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Alokasi dana desa untuk setiap desa diatur dalam pasal 12 PP Nomor 60 tahun 2014 yang menyebutkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Penyaluran dana desa dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2016). Penyaluran Dana Desa yang dilakukan secara bertahap dijelaskan pada Pasal 16 secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014).

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%

c. Tahap III pada bulan November sebesar 20%

Terkait dengan pelaporan, kepala desa menyampaikan terkait realisasi dana desa kepada bupati/walikota. Kemudian Bupati/walikota tersebut akan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi dana penggunaan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2016).

#### **2.1.4 Akuntabilitas Dana Desa**

Akuntabilitas adalah pemberian informasi kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini kepada publik dan konstituen lain yang menjadi *stakeholder* (Mahmudi, 2019). **Akuntabilitas dana desa** berarti bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atas segala aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat sebagai prinsipal (Triyono *et al.*, 2019). Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan *good governance* yang mana setiap organisasi wajib meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam lingkup pemerintahan desa, diperlukan upaya peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan untuk memelihara kepercayaan publik yang menuntut akuntabilitas (Said dan Alam, 2018).

Akuntabilitas ini terdiri dari dua macam yakni, akuntabilitas vertikal dan horizontal (Mahmudi, 2019). Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas

kepada pihak yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala desa kepada camat atau kepala daerah. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik atau lembaga lain yang mempunyai kedudukan yang sama. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh organisasi sektor publik (Ellwood, 1993; Mardiasmo, 2018), yakni sebagai berikut.

1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas untuk kejujuran dan hukum mengacu pada kepastian terhadap kepatuhan hukum dan syarat wajib lainnya dalam penggunaan sumber daya milik organisasi. Akuntabilitas ini juga dapat terkait dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang.

2) Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses menyangkut kinerja prosedur yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Proses ini mencakup sistem informasi akuntansi dan manajemen, serta secara administratif. Akuntabilitas ini dapat dicapai melalui layanan kepada masyarakat yang cepat, responsif, dan terjangkau. Tidak hanya itu, akuntabilitas proses perlu dipantau dan diperiksa dengan memastikan tidak adanya *mark-up*, pungutan liar, pemborosan biaya, serta proses tender pelaksanaan proyek.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program mempertimbangkan apakah organisasi telah mencapai tujuannya.

4) Akuntabilitas kebijakan



Berkaitan dengan kebijakan dan standar apa yang ditetapkan organisasi terkait dengan operasi mereka. Akuntabilitas kebijakan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat atas kebijakan yang diambil.

## **2.2 Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

### **2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Mengelola dana desa tentunya memerlukan kompetensi sumber daya manusia dalam prosesnya. Aparat desa dengan kompetensi yang tepat tentunya akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa (Dewi dan Gayatri, 2019). Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang meliputi kualitas, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan aktivitas tertentu dengan kompeten (Skorková, 2016). Kompetensi aparat desa didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa tersebut untuk melakukan tugas dan komponen penting lainnya yang mendukung kinerja pemerintah desa (Hardiningsih *et al.*, 2020).

Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal ataupun keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui kursus atau bimbingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menunjang pembuatan laporan keuangan (Hardiningsih *et al.*, 2020). Tidak hanya itu, aparat desa tentunya sadar bahwa kompetensi merupakan salah satu komponen terpenting guna mewujudkan akuntabilitas. Hal tersebut akan terwujud dengan diimbangi kemampuan aparat desa dalam mengelola anggaran.

### 2.2.2 Sistem Pengendalian Internal

Dalam mengelola dana desa dengan jumlah besar dibutuhkan sebuah sistem pengendalian internal memadai. Sistem pengendalian internal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada peraturan tersebut, didefinisikan SPIP sebagai.

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

SPIP menjadi standar dalam mengendalikan pengelolaan dana desa sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kehadiran SPIP diharapkan mampu menciptakan *good governance* sehingga mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel yang ditampakkan dari visi dan misi serta tujuan, laporan keuangan yang andal, pengurangan peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah desa (Hafit *et al.*, 2018). Oleh karena itu, sistem pengendalian internal menjadi penting karena dapat memberikan keyakinan atau jaminan bahwa segala aktivitas pengelolaan dana desa.

*The Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) mengeluarkan *integral control-integrated framework* pada tahun 1992 yang diterima secara luas dan telah diimplementasikan dalam kebijakan, aturan, serta regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Kerangka sistem pengendalian internal tersebut diperbarui tahun 2013 untuk menyesuaikan dengan proses bisnis dan perkembangan teknologi. Kerangka ini terdiri dari lima komponen kerangka kerja dan 17 prinsip tambahan yang mendukung konsep tersebut (Romney dan

Steinbart, 2018). Lima komponen yang termasuk dalam komponen tersebut meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

### **2.2.3 Implementasi SISKEUDES**

Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi dapat membantu mewujudkan akuntabilitas dan mengatasi penyelewengan dana. SISKEUDES dirancang sebagai aplikasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kapabilitas pemerintah desa dalam mengelola dan mewujudkan akuntabilitas keuangan (Indriani *et al.*, 2020). Aplikasi ini diterapkan secara bertahap mulai tahun 2016 di seluruh desa. Selain itu SISKEUDES berguna untuk membantu desa dalam melakukan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian Indriani *et al.*, (2020) menerangkan bahwa SISKEUDES merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung penyelenggaraan desa yang baik dan akuntabel. SISKEUDES dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa sebagai konsekuensi diundangkannya Undang-Undang Desa dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Triyono *et al.*, 2019). Dalam penelitian yang sama Triyono *et al.* (2019) menyatakan Aplikasi SISKEUDES didesign dengan *simple, user-friendly*, dan fitur yang memudahkan pengguna. Fungsi dan manfaat yang ditawarkan oleh SISKEUDES sama dengan yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi (Indriani *et al.*, 2020). Serta dapat menghasilkan hasil yang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dengan satu input saja. Implementasi SISKEUDES memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas dana desa (Bawono *et al.*, 2020).

#### 2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban atas integritas keuangan, pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Triyono *et al.*, 2019). Dalam Standar Akuntansi Pemerintah diterangkan bahwa setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur salah satunya demi kepentingan akuntabilitas. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa terdiri dari laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan laporan realisasi kegiatan (Puspa dan Prasetyo, 2020). Pelaporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021).

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2021), terdapat beberapa karakteristik kualitatif penyajian laporan keuangan untuk dapat memenuhi tujuan yakni sebagai berikut.

a. Relevan

Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang informasi di dalamnya dapat memengaruhi keputusan penggunaannya yang meliputi dapat menjadi bahan evaluasi masa kini ataupun masa lalu, memberikan prediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu.

b. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta dengan jujur, dan bisa diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelum atau laporan dari entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Dapat dipahami berarti informasi yang disajikan dapat dipahami oleh penggunaannya dan dinyatakan dengan bentuk ataupun istilah yang telah disesuaikan.

### 2.2.5 Tingkat Pendidikan

*The International Standard Classification of Education (ISCED) 2011* mendefinisikan tingkat pendidikan sebagai konstruksi yang berdasar pada asumsi bahwa program pendidikan dapat dikelompokkan dalam rangkaian kategori. Kategori ini merepresentasikan tingkat kompleksitas dan spesialisasi isi program pendidikan, dari dasar hingga kompleks (UNESCO, 2011). Murina dan Rahmawaty (2017) memaparkan orang yang mengemban pendidikan akan berpikir dan bertindak secara rasional, serta dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik terutama dalam mengelola anggaran dana desa. Oleh karena itu, tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menjelaskan intelektualitas yang dimiliki seseorang (Sukriani *et al.*, 2018).

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Penerapan Akuntabilitas	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
			Independent	Dependen		
1.	Hehanussa, 2015	Keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyajian laporan keuangan (PLK)</li> <li>• Aksesabilitas laporan keuangan (ALK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi dan Akuntabilitas (TdAK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif.</li> <li>• Pegawai pemerintah kota (Pemkot), dosen perguruan tinggi, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan Manajemen di Kota Ambon.</li> <li>• Regresi berganda-SPSS</li> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLK=&gt;TdAk (didukung)</li> <li>• ALK=&gt;TdAk (didukung)</li> </ul>

Tabel 2. 1 Lanjutan

2.	(Yesinia <i>et al.</i> , 2018)	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran aparat desa (PAD)</li> <li>• Sistem Pengendalian Internal (SPI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• 42 aparat desa Yosowilangun, Lumajang</li> <li>• Regresi berganda-SPSS</li> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD=&gt;AK (didukung)</li> <li>• SPI=&gt;AK (didukung)</li> </ul>
3.	(Alam <i>et al.</i> , 2019)	Lembaga Sektor publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem integritas (SI)</li> <li>• Sistem pengendalian internal (SPI)</li> <li>• <i>Leadership</i> (LD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif.</li> <li>• 109 responden di departemen dan lembaga di bawah 24 kementerian federal di Malaysia.</li> <li>• Statistik deskriptif, regresi ordinal, dan SEM.</li> <li>• <i>Stakeholder Theory</i></li> </ul>	<p><b>Pada pengujian secara regresi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI=&gt;AK (didukung)</li> <li>• SPI=&gt; AK (didukung)</li> <li>• LD=&gt; AK (didukung)</li> </ul> <p><b>Pengujian menggunakan SEM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI=&gt; AK (didukung)</li> <li>• LD=&gt; AK (didukung)</li> <li>• SPI=&gt;AK (tidak didukung)</li> </ul>

Tabel 2. 1 Lanjutan

4.	(Triyono <i>et al.</i> , 2019)	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyajian laporan keuangan (PLK)</li> <li>• Aksesabilitas laporan keuangan (ALK)</li> <li>• Kualitas pengawasan BPD (KP-BPD)</li> <li>• Kompetensi (KOM)</li> <li>• SISKEUDES</li> <li>• Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas (AK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• 186 responden yang terdiri dari kepala dan sekretaris desa di Kabupaten Wonogiri.</li> <li>• Regresi berganda-SPSS</li> <li>• <i>Stewardship Theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLK=&gt;AK (tidak didukung)</li> <li>• ALK=&gt;AK (tidak didukung)</li> <li>• KOM =&gt; AK (tidak didukung)</li> <li>• KP-BPD=&gt;AK (didukung)</li> <li>• SISKEUDES=&gt;AK (didukung)</li> <li>• SPIP=&gt;Ak (didukung)</li> </ul>
5.	(Puspa dan Prasetyo, 2020)	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi (KO)</li> <li>• Sistem pengendalian internal (SPI)</li> <li>• Aksesabilitas laporan keuangan (ALK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas (AK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• 110 kepala desa dan bendahara di Kabupaten Pariaman</li> <li>• Regresi berganda-SPSS</li> <li>• <i>Stewardship Theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KOM=&gt;AK (didukung)</li> <li>• SPI=&gt;AK (didukung)</li> <li>• ALK=&gt;AK (tidak didukung)</li> </ul>



Tabel 2. 1 Lanjutan

6.	(Bawono <i>et al.</i> , 2020)	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran aparat desa (AAD)</li> <li>• Kompetensi (KOM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas (AK)</li> </ul> <p>Intervening Variable</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SISKEUDES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• 182 sekretaris dan kepala urusan keuangan desa di Kabupaten Banyumas.</li> <li>• <i>Partial Least Square - Warp PLS</i></li> <li>• <i>Stewardship Theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AAD=&gt;SISKEUDES (didukung)</li> <li>• KOM=&gt;SISKEUDES (didukung)</li> <li>• AAD=&gt;AK (didukung)</li> <li>• KOM=&gt;AK (didukung)</li> <li>• SISKEUDES=&gt;AK (didukung)</li> <li>• Selanjutnya implementasi Siskudes dapat memediasi hubungan antara peran dan kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas.</li> </ul>
7.	(Hardiningsih <i>et al.</i> , 2020)	Alokasi dana desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi (KOM)</li> <li>• Komitmen organisasi (KO)</li> <li>• Sistem pengendalian internal (SPI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas (AK)</li> </ul> <p>Variable moderasi:</p> <p>Tingkat Pendidikan (TP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• 115 responden terdiri dari kepala, sekretaris, bendahara, kepala divisi, dan badan konsultatif desa di kecamatan Undaan, Kudus.</li> <li>• <i>SEM - Warp PLS</i></li> <li>• <i>Stewardship Theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KOM=&gt;AK (didukung)</li> <li>• KO =&gt;AK (didukung)</li> <li>• SPI=&gt; AK (didukung)</li> <li>• Selain itu, tingkat Pendidikan juga menguatkan pengaruh kompetensi aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.</li> </ul>

Tabel 2. 1 Lanjutan

8.	(Savitri <i>et al.</i> , 2020)	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leadership</i> (LD)</li> <li>• Sistem Pengendalian Internal (SPI)</li> <li>• Komitmen organisasi (KO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas (AK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Sampel: 164 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, anggota BPD, dan komunitas lokal yang berada di Kabupaten Siak dan Kampar, Riau.</li> <li>• Regresi linear berganda - SPSS</li> <li>• <i>Stewardship Theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LD=&gt;AK (didukung)</li> <li>• SPI=&gt; AK (didukung)</li> <li>• KO=&gt; AK (didukung)</li> </ul>
9.	(Tran <i>et al.</i> , 2021)	Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan Akuntansi (KA)</li> <li>• <i>Leadership</i> (LD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas (AK)</li> </ul> <p>Variabel Intervening</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas laporan keuangan (KLK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif.</li> <li>• Sampel: 177 akuntan dan manajer perusahaan publik yang berada di Vietnam dan telah mempunyai minimal tiga tahun pengalaman kerja.</li> <li>• PLS-SEM</li> <li>• <i>Institutional theory</i> dan <i>Contingency theory</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KA=&gt;KLK (didukung)</li> <li>• LD=&gt;KLK (didukung)</li> <li>• KA=&gt;AK (didukung)</li> <li>• LD=&gt;AK (didukung)</li> <li>• KLK=&gt;AK (didukung)</li> </ul>

Dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa variabel yang memengaruhi akuntabilitas adalah peran aparat desa, sistem pengendalian internal, integritas, *leadership*, penyajian laporan keuangan, aksesabilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kompetensi, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Komitmen organisasi, dan Kemampuan Akuntansi. Semua penelitian terdahulu tersebut menggunakan metode kuantitatif dan sampel diperoleh mayoritas melalui distribusi kuesioner. Responden penelitian terdahulu sangatlah bervariasi seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan keuangan, komunitas lokal, akuntan dan manajer, mahasiswa, dan sebagainya. Alat uji yang digunakan cukup bervariasi seperti regresi linear berganda menggunakan SPSS, statistik deskriptif, dan *Structural Equation Model* (SEM). Peneliti sebelumnya mendukung penelitiannya menggunakan beragam teori seperti *Stewardship Theory*, *Institutional Theory*, *Stakeholder Theory*, dan *Contingency Theory*.

Penelitian sebelumnya pun menunjukkan hasil yang bervariasi. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Bawono *et al.*, 2020; Hardiningsih *et al.*, 2020; Puspa dan Prasetyo, 2020). Namun hasil berbeda terjadi penelitian milik Triyono *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak mendukung pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel Sistem pengendalian internal pun mendukung pengaruh akuntabilitas dana desa (Savitri *et al.*, 2020; Yesinia *et al.*, 2018). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Triyono *et al.*, 2019). Hal serupa juga terjadi

pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memberikan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan desa (Bawono *et al.*, 2020). Penyajian laporan keuangan pun ditemukan juga sebagai salah satu hal yang mendukung pengelolaan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Triyono *et al.*, 2019). Tidak hanya itu, Tingkat Pendidikan menguatkan kompetensi aparat desa terhadap pengaruhnya dalam pengelolaan dana desa (Hardiningsih *et al.*, 2020).

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas**

Kompetensi sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dan meraih tujuan yang ditentukan. Kompetensi yang dibutuhkan dalam lingkup pengelolaan keuangan, aparat desa harus mempunyai pemahaman yang baik, *skill*, dan kemampuan untuk mengerti logika akuntansi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan yang akuntabel dan professional (Triyono *et al.*, 2019). Kompetensi erat kaitannya dengan teori *Stewardship* yakni manajer atau kepala desa sebagai eksekutif memainkan peran dan menjalankan mandatnya guna mencapai tujuan organisasi di lingkup pemerintahan desa (Hardiningsih *et al.*, 2020). Demi menjalankan mandat yang telah diamanahkan, aparat desa perlu mempunyai kompetensi yang kuat untuk mencapai tujuannya, salah satunya adalah akuntabilitas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa (Aziiz dan Prastiti, 2019; Hardiningsih *et al.*, 2020; Mada *et al.*, 2017). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Triyono *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak

berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan diskusi di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H1:** Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas**

Sistem pengendalian internal memainkan peranan vital dalam sebuah organisasi. Selain itu, pengendalian internal juga merupakan salah satu elemen untuk mewujudkan akuntabilitas. Hal tersebut tidak dapat terpisahkan dari struktur tata kelola organisasi yang ditujukan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas dengan mendorong transparansi, tanggungjawab, dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan (Bowrin, 2004). Kegagalan dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang andal dapat merugikan organisasi dalam banyak hal, misalnya penyalahgunaan jabatan, aset, serta dapat menimbulkan penyelewengan finansial. Dalam pendekatan *stewardship*, pemerintah desa sebagai *stewards* menjalankan sistem pengendalian internal untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal (Cahyani *et al.*, 2019). Studi Hardiningsih *et al.* (2020) memperjelas studi sebelumnya, pemerintah desa melaksanakan sistem pengendalian internal sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatannya maka masyarakat akan meyakini pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya.

Terdapat perbedaan hasil dalam beberapa penelitian sebelumnya terkait sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memberikan

pengaruhnya dalam pengelolaan akuntabilitas dana desa (Puspa dan Prasetyo, 2020; Savitri *et al.*, 2020). Lebih mendalam, pada penelitian Triyono *et al.* (2019) yang mengkaji terkait pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga menunjukkan pengaruhnya yang signifikan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hal berbeda terjadi pada penelitian milik Alam *et al.* (2019) yang melakukan penelitian di lembaga sektor publik Malaysia, sistem pengendalian internal tidak memengaruhi secara signifikan akuntabilitas sektor publik. Dengan penjabaran tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

**H2:** Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **2.4.3 Pengaruh Implementasi SISKEUDES terhadap Akuntabilitas**

Pemanfaatan sistem informasi telah digunakan di berbagai sektor tak terkecuali pemerintah desa. Dengan jumlah dana desa yang jumlahnya yang terus meningkat disertai dengan peningkatan kekompleksan kegiatan pemerintahan tiap tahunnya, aparat desa sebagai *steward* pun harus menyesuaikan diri untuk menggunakan sistem teknologi informasi keuangan untuk menunjang kinerjanya (Bawono *et al.*, 2020). SISKEUDES yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui BPKP diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES didorong untuk memberikan kemudahan proses penganggaran, pengelolaan, dan memaksimalkan akuntabilitas laporan keuangan desa. Tentunya aplikasi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan desa dalam rangka pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bawono *et al.*, 2020). Penerapan SISKEUDES di pemerintah desa berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Bawono *et al.*, 2020; Triyono *et al.*, 2019). Namun hasil berbeda ditemukan pada studi milik Amalya *et al.* (2017) yang menerangkan bahwa implementasi SISKEUDES belum mampu memberikan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mengacu pada ketidakkonsistenan temuan dalam literatur sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H3:** Implementasi SISKEUDES berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **2.4.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas**

*International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) menyatakan pelaporan keuangan sektor publik ditujukan untuk melayani tujuan evaluasi akuntabilitas dan pengambilan keputusan pengguna. Puspa dan Prasetyo (2020) menerangkan akuntabilitas merupakan tujuan dan dasar pelaporan keuangan. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi atas segala kegiatan yang menggunakan dana desa. Penyajian laporan keuangan dana desa saat ini dapat ditemui di kantor desa ataupun website resmi desa yang diperbarui secara berkala. Dalam penelitian Hehanussa (2015) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Ambon. Namun studi yang dilakukan oleh Triyono *et al.* (2019) di desa yang berada di Kabupaten Wonogiri menyatakan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H4:** Penyajian laporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### **2.4.5 Pengaruh Tingkat Pendidikan Dalam Memperkuat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas**

Dalam mengelola dana desa tentunya aparat desa perlu mempunyai kompetensi yang mumpuni. Kompetensi yang dimiliki aparat desa yang didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai dapat membantu terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Hardiningsih *et al.*, 2020). Kompetensi tersebut akan mendukung penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal ini selaras dengan teori *stewardship* yang menerangkan bahwa aparat desa sebagai pengelola berperan dalam mencakapi tujuan organisasi yakni menjalankan rencana alokasi penggunaan dana desa dan menyusun laporan realisasi di setiap tahap (Cahyani *et al.*, 2019). Penelitian menggunakan pemoderasi tingkat pendidikan yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.* (2020) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mengacu pada hasil tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

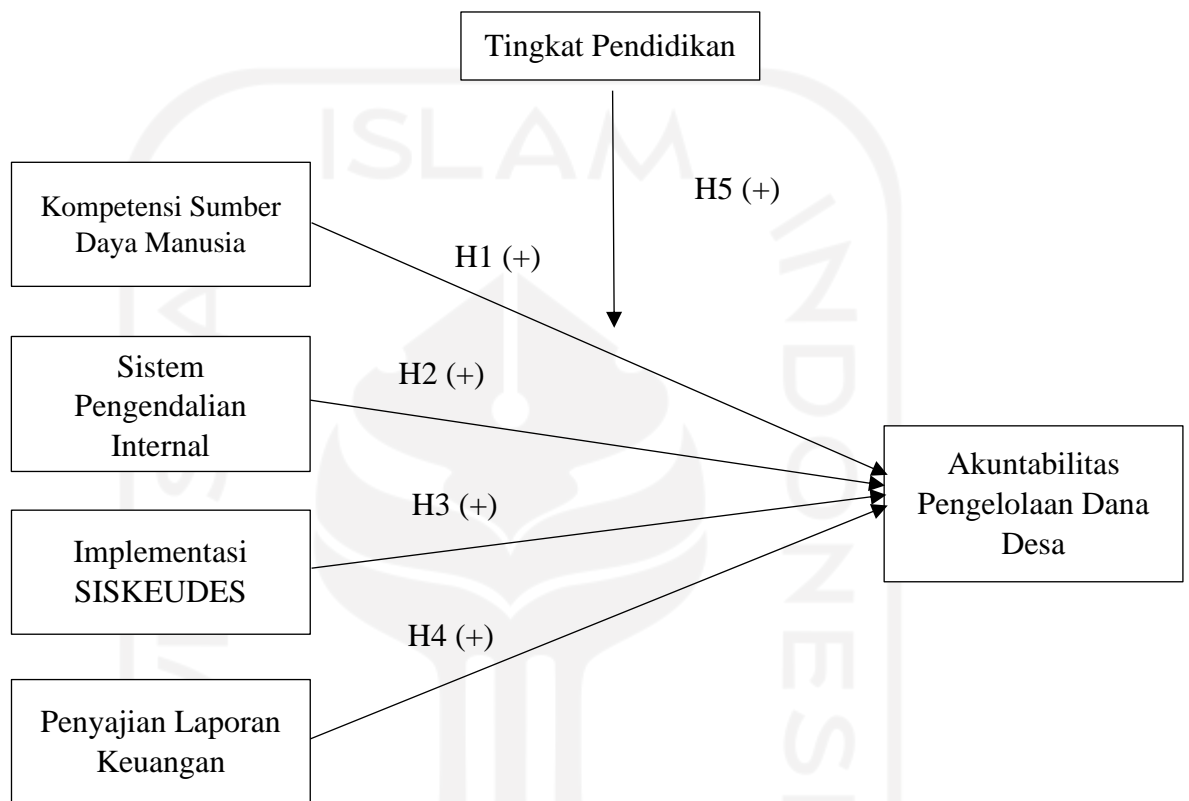
**H5:** Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **2.5 Model Penelitian**

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan pada bagian sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem



pengendalian internal, implementasi SISKEUDES, penyajian laporan keuangan dengan tingkat pendidikan sebagai variabel pemoderasi terhadap akuntabilitas dana desa diilustrasikan model penelitian seperti pada Gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Model Penelitian

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui survei dengan teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada aparat desa yang meliputi, kepala, sekretaris, dan kepala urusan keuangan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *offline* menggunakan *hard copy*.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan dari elemen yang nantinya akan dibuat beberapa kesimpulan (Cooper dan Schindler, 2014). Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili dalam sebuah penelitian (Hair Jr *et al.*, 2014). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena peneliti dapat menentukan kriteria penilaian yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi tujuan penelitian (Cooper dan Schindler, 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa seperti Kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan yang berada di Kabupaten Sleman. Jumlah desa yang berada di Kabupaten Sleman yakni 86 desa. Total populasi dalam penelitian ini adalah 258 aparat. Sedangkan penghitungan sampel menggunakan rumus Slovin dikarenakan jumlah sampel dalam penelitian ini telah diketahui. Berikut di bawah ini penghitungan sampel menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  : ukuran sampel yang dicari

$N$  : populasi

$e$  : *margin of error* (5%)

Berdasarkan rumus Slovin di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{258}{1 + (258 \times (0,05)^2)}$$

$$n = \frac{258}{1+0,645}$$

$$n = \frac{258}{1,645}$$

$$n = 156,83$$

Jumlah sampel minimal yang inimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini sejumlah 156,8. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 159 responden dengan harapan data menjadi lebih akurat.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa pendistribusian kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana setiap orang yang menjadi objek penelitian diminta untuk memberikan tanggapan atas serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (Saunders *et al.*, 2009). Pendistribusian kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara *offline*. Data yang

diperoleh dari kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diamati dan bervariasi dari orang atau organisasi yang sedang dipelajari (Creswell, 2014). Untuk mendapatkan data yang bernilai, peneliti menggunakan skala *likert* dengan skala 1 hingga 6. Responden nantinya akan diminta untuk mengisi kolom yang disediakan berdasarkan pandangan masing-masing atas pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Dengan skala 1 hingga 6 tersebut, nilai 1 berhubungan dengan pernyataan sangat tidak setuju yang berarti tingkat persetujuan responden bernilai rendah. Nilai 6 berkaitan dengan pernyataan sangat setuju dan nilai tersebut berarti tingkat persetujuan responden atas kuesioner bernilai tinggi.

#### **3.4.1 Akuntabilitas Dana Desa**

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban agen untuk memberikan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan pertanggungjawaban atas segala kegiatan kepada prinsipal yang berhak dan berkewajiban menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Dalam penelitian ini akuntabilitas berperan sebagai variabel dependen yang dihubungkan dengan variabel independen seperti yakni kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, implementasi SISKEUDES, dan penyajian laporan keuangan. Variabel ini diukur menggunakan indikator perencanaan, transparansi, pembiayaan aktivitas, pertanggungjawaban, dan evaluasi (Ardianti dan Suartana, 2020).

Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut, peneliti mengajukan 10 item pertanyaan seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1** Indikator Akuntabilitas

No	Indikator	Sumber
1.	Penyusunan anggaran pemerintah desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya.	Ardianti dan Suartana (2020)
2.	Pembuatan rencana kegiatan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran.	
3.	Pengajuan anggaran kegiatan yang menggunakan dana desa disertai dengan perencanaan dan penganggaran yang diajukan sebagai dasar penyusunan APBDes.	
4.	Pengelolaan keuangan dana desa disusun secara jujur dan terhindar dari penyalahgunaan jabatan serta telah sesuai dengan regulasi.	
5.	Selalu melakukan pengecekan terhadap jalannya program.	
6.	Pencatatan belanja, pendapatan, dan pembiayaan harus disertai dengan dokumen atau bukti pelaksanaan anggaran.	
7.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi Dana desa kepada bupati/walikota.	
8.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.	
9.	Evaluasi kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.	
10.	Tahapan pengelolaan keuangan dana desa melibatkan unsur-unsur masyarakat.	

### 3.4.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi memiliki beberapa aspek meliputi keterampilan, pendekatan melalui keyakinan dan nilai, kemampuan, dan kapabilitas sarana dan sumber daya yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh karyawan dalam mencapai pengembangan pribadi dan organisasi (Shikova, 2020). Dalam pengelolaan dana

desa, kompetensi merujuk pada kemampuan yang dimiliki aparat desa untuk melakukan tugasnya dalam rangka mendukung kinerja dan mencapai akuntabilitas. Selain itu, kompetensi merupakan faktor internal yang dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Puspa dan Prasetyo, 2020). Apabila faktor kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa masih rendah akan mengakibatkan pengelolaan dana desa menjadi tidak akuntabel. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan kompetensi mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk mengetahui pengaruh faktor kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti mengajukan 10 item pernyataan yang dikembangkan oleh Mada *et al.* (2017) dan Triyono *et al.* (2019) yang meliputi pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Item pernyataan disajikan dalam Tabel 3.2.

**Tabel 3. 2** Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Sumber
1.	Saya mengerti tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa dalam pengelolaan dana desa	Mada <i>et al.</i> (2017) dan Triyono <i>et al.</i> (2019)
2.	Saya mengetahui semua proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dana desa	
3.	Saya mempunyai pemahaman akuntansi dalam mengelola dana desa	
4.	Saya mengikuti perkembangan di bidang akuntansi dengan membaca literatur seperti buku, artikel, dan sumber lainnya	
5.	Saya mempunyai keterampilan untuk mengelola anggaran dana desa	
6.	Saya mempunyai keterampilan untuk menyajikan laporan keuangan	

**Tabel 3.2** Lanjutan

No	Indikator	Sumber
7.	Saya mempunyai keterampilan untuk mencari solusi dalam mengelola dana desa	Mada <i>et al.</i> (2017) dan Triyono <i>et al.</i> (2019)
8.	Saya mempunyai inisiatif dalam bekerja	
9.	Saya mempunyai tanggungjawab sosial dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa	
10.	Saya mempunyai kemauan untuk mengembangkan diri dan belajar secara terus menerus	

### 3.4.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi (Romney dan Steinbart, 2018). Sistem pengendalian internal merupakan proses yang terintegrasi dengan aktivitas manajemen. Sistem pengendalian internal desa menyediakan prosedur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan pemantauan secara sistematis terhadap aktivitas pemerintah desa. Di dalamnya tertera aspek-aspek yang dirancang untuk meminimalisasi kecurangan yang disebabkan oleh individu (Wahyudi *et al.*, 2022). Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan lima unsur yang ada harus ada dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yakni: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.

Untuk mengetahui pengaruh faktor sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti mengajukan 14 item pernyataan yang

dikembangkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Item pernyataan disajikan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3. 3** Indikator Sistem Pengendalian Internal

No	Indikator	Sumber
1.	Pemerintah desa membentuk aturan secara tertulis yang mengatur perilaku perangkat desa dan menerapkannya	(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008; Romney dan Steinbart, 2018)
2.	Pemerintah desa telah mempunyai struktur yang jelas	
3.	Kepala desa mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi.	
4.	Kepala desa mempunyai rencana upaya mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi	
5.	Kepala desa mengidentifikasi dan menilai perubahan yang mungkin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem pengendalian internal	
6.	Pemerintah desa memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas	
7.	Setiap transaksi yang terjadi selalu disertai dengan bukti pendukung sebelum dicatat	
8.	Dalam melakukan pencatatan, kode akun yang digunakan adalah kode akun yang sesuai dengan transaksi yang dimaksud	
9.	Mengamankan aset, catatan, dan data dari kerusakan	
10.	Terdapat otorisasi yang jelas atas transaksi ataupun aktivitas yang terjadi	
11.	Menyediakan informasi yang relevan, berkualitas, untuk mendukung pengendalian internal	
12.	Komunikasi antar pihak dilakukan secara terbuka dan efektif dengan pihak lain seperti rekan kerja, masyarakat, dan badan pengawas intern	
13.	Pemerintah desa selalu melakukan evaluasi dan supervisi atas sistem pengendalian internal yang berjalan secara berkala.	
14.	Pemerintah desa selalu menindaklanjuti dari setiap saran dan temuan yang diberikan oleh inspektorat	



### 3.4.4 Implementasi SISKEUDES

Implementasi SISKEUDES merupakan tahapan pencatatan, pengadministrasian, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa menggunakan teknologi informasi (Amalya *et al.*, 2017). Elemen sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam SISKEUDES dan fitur-fitur di dalamnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai peraturan yang berlaku yang dimaksud adalah penyusunan instruksi dan prosedur telah memperhatikan peraturan yang berlaku (Indriani *et al.*, 2020). Sistem keuangan yang baik serta mudah dan memberikan kebermanfaatan kelak berdampak terhadap pencapaian akuntabilitas terperinci dari aspek kejujuran, kepatuhan hukum, dan proses pengelolaan dana desa (Triyono *et al.*, 2019).

Untuk mengetahui pengaruh faktor implementasi Aplikasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti mengajukan 10 item pernyataan yang dikembangkan oleh Triyono *et al.* (2019). Item pernyataan disajikan dalam Tabel 3.4.

**Tabel 3. 4** Indikator Kompetensi Implementasi SISKEUDES

No	Indikator	Sumber
1.	Aplikasi SISKEUDES mudah digunakan dan dipahami	Triyono <i>et al.</i> (2019)
2.	Aplikasi SISKEUDES meringankan beban pekerjaan dalam pembuatan laporan keuangan desa	
3.	Penggunaan Aplikasi SISKEUDES mengurangi resiko kesalahan pelaporan keuangan desa	
4.	Aplikasi SISKEUDES menghilangkan resiko penyimpangan dan menghindarkan dari manipulasi pertanggungjawaban belanja desa.	
5.	Aplikasi SISKEUDES memiliki fitur-fitur layanan lengkap sesuai kebutuhan desa	
6.	Aplikasi SISKEUDES sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa	

**Tabel 3. 4** Lanjutan

No	Indikator	Sumber
7.	Aplikasi SISKEUDES memiliki pembaruan yang berkelanjutan	Triyono <i>et al.</i> (2019)
8.	Aplikasi SISKEUDES dimanfaatkan secara benar dan digunakan secara berkala dan berkesinambungan.	
9.	Aplikasi SISKEUDES digunakan secara terbuka dan akuntabel.	
10.	Aplikasi SISKEUDES menambah akuntabilitas pengelolaan dana desa.	

### 3.4.5 Penyajian Laporan Keuangan

*International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) mengeluarkan seperangkat standar akuntansi publik internasional untuk memandu pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya di seluruh dunia untuk menyiapkan laporan keuangan untuk memastikan kualitas kualitatif, seperti relevansi, keandalan, pemahaman, ketepatan waktu, komparabilitas, dan keterverifikasian (IPSASB, 2018). Dalam penelitian milik Tran *et al.* (2021) menyatakan kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas organisasi publik yang berada di Vietnam. Organisasi sektor publik yang menyediakan kualitas informasi akuntansi dengan baik membantu meningkatkan akuntabilitas (Tran *et al.*, 2021). Tak hanya itu, ke depannya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Untuk mengetahui pengaruh faktor penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti mengajukan 13 item pernyataan yang dikembangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah yang meliputi relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Item pernyataan disajikan dalam Tabel 3.5.

**Tabel 3. 5** Indikator Penyajian Laporan Keuangan

No	Indikator	Sumber
1.	Laporan keuangan yang disusun bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material	(Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021)
2.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah berisi informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan	
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah teruji kebenarannya	
4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah	
5.	Informasi yang telah disusun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu	
6.	Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan SAP	
7.	Laporan keuangan yang telah disusun disajikan secara tepat waktu sebagai bahan pengambilan keputusan	
8.	Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan di masa lalu dan memprediksi kejadian yang akan datang	
9.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang telah disusun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	
10.	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun	
11.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan	
12.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinyatakan dengan bentuk ataupun istilah yang telah disesuaikan	

#### 3.4.6 Tingkat pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan didefinisikan sebagai tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan yang

dimiliki seseorang menunjukkan kualitasnya. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini diukur dengan jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh aparat desa yang meliputi, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi.

### **3.5 Metode Analisis**

Data yang telah diperoleh dari pendistribusian kuesioner yang dibagikan kepada aparat desa yang berada di Kabupaten Sleman kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Untuk menguji hipotesis menggunakan analisis kuantitatif dengan metode *Partial Least Square (PLS)* menggunakan SmartPLS.

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kevalidan sebuah kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila item pertanyaan di dalamnya mampu menjelaskan indikator yang diukur (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, validitas diuji menggunakan dua pengujian yakni validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. *Rule of thumb* untuk nilai *loading factor* yakni 0,6 dan AVE di atas 0,5. Validitas diskriminan dapat diukur dengan membandingkan nilai *cross loading* antar konstruk indikator dengan konstruk yang lain. Selain itu juga dapat dilihat dengan menilik nilai *Hetero Monorait Ratio (HTMT)*. Batasan nilai HTMT yakni berada di bawah 0,85 atau 0,90 (Hair *et al.*, 2020).

### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas suatu indikator variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel ditentukan berdasarkan konsistensi atau kestabilan jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diajukan (Ghozali, 2018). Untuk menguji tingkat reliabilitas dalam penelitian digunakan uji *Cornbach Alpha* dan *Composite reliability*. Batas untuk kedua pengujian ini adalah 0,7 (Hair *et al.*, 2020).

### 3.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk menguji akurasi prediksi model (Hair *et al.*, 2014). Peneliti dapat menilai bagaimana kekuatan hubungan antar variabel dependen numerik dengan variabel independen numerik (Ghozali, 2018). Ghozali (2018) menjelaskan nilai dari koefisien determinasi yakni antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  kecil dapat dikatakan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai mendekati angka satu dapat dikatakan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilihat dari tiga cara yakni dengan p-value, t-stat (uji statistik t), dan koefisien jalur. Uji statistik T digunakan untuk mengetahui probabilitas hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen (Saunders *et al.*, 2009). Ghozali (2018) menerangkan pengambilan keputusan hipotesis didukung atau tidak didukung didasarkan pada

tingkat signifikansi. Ambang batas hipotesis didukung atau tidak didukung yakni  $\pm 1,96$ . Hipotesis tidak didukung apabila nilai t-stat berada di antara  $-1,96$  dan  $1,96$ . Nilai *p-value* digunakan untuk menilai pengaruh hubungan antar variabel. Jika *p-value* bernilai kurang dari 0,05 dinyatakan berpengaruh. Serta koefisien jalur mengindikasikan nilai positif atau negatif hubungan antar variabel, apabila nilai mendekati +1 dapat dikatakan memiliki hubungan positif yang kuat dan sebaliknya (Hair Jr *et al.*, 2021).

### 3.5.5 Uji Goodness of Fit

Uji *Goodness of Fit* merupakan untuk mengukur seberapa baik model yang digunakan dalam mereproduksi matriks kovarians di antara item yang diteliti, yakni kesamaan matriks kovarians yang diamati (kenyataan) dan yang diperkirakan (teori) (Hair Jr *et al.*, 2014). Setelah model tersebut diperkirakan, model ini akan membandingkan teori dengan kenyataan dengan menilai kesamaan matriks kovarians yang diperkirakan (teori) dengan matriks kenyataan yang diamati (kenyataan). Jika kedua matriks tersebut bernilai sama maka teori peneliti dikatakan sempurna (Hair Jr *et al.*, 2014).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Proses dan Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendistribusian kuesioner kepada aparat desa yang berada di Kabupaten Sleman. Sebelum melakukan pendistribusian secara massal peneliti melakukan *pilot test* guna mengetahui apakah penelitian sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Setelah terkumpul dan dirasa sesuai, peneliti mulai mendistribusikan ke beberapa kelurahan di Kabupaten Sleman sesuai jumlah sampel minimal. Proses pendistribusian dimulai 9 Mei s.d 28 Juni termasuk melakukan *pilot test*.

Kuesioner dibagikan ke aparat desa yang tersebar di 49 kelurahan. Namun tidak semua kuesioner dapat diolah. Dari semua kuesioner tersebut sebanyak 159 yang dapat diolah, 3 tidak kembali, dan 11 tidak dapat diolah dikarenakan responden tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil tersebut dapat diterangkan dalam tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4. 1** Hasil Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	173	100%
Kuesioner yang kembali	170	98%
Kuesioner yang tidak kembali	3	2%
Kuesioner memenuhi syarat	159	92%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	11	6%
Sumber: Data diolah (2022)		

## 4.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, lama menjabat, nama kelurahan tempat bekerja, dan kecamatan tempat bekerja.

### 4.2.1. Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi responden menurut jenis kelamin.

**Tabel 4. 2** Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	127	79,87%
Perempuan	32	20,13%
Sumber: Data diolah (2022)		

Dari total 159 aparat desa yang mengisi kuesioner, persentase responden yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi apabila dikomparasikan dengan perempuan. Sebanyak 127 orang atau 79,87% berjenis kelamin laki-laki dan 32 orang lainnya atau 20,13% berjenis kelamin perempuan.

### 4.2.2. Klasifikasi Responden Menurut Usia

Tabel 4.3 di bawah ini menggambarkan jumlah dan persentase responden menurut usia. Klasifikasi responden dalam penelitian ini dibagi menjadi sembilan kelas dengan panjang interval lima. Usia aparat desa cukup variatif mulai dari rentang 20 tahun hingga lebih dari 60 tahun seperti yang tertera dalam tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4. 3** Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-25	1	0,63%
26-30	15	9,43%



**Tabel 4.3 Lanjutan**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
31-35	10	6,29%
36-40	13	8,18%
41-45	46	28,93%
46-50	20	12,58%
51-55	19	11,95%
56-60	20	12,58%
Di atas 60 tahun	15	9,43%
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>100,00%</b>
Sumber: Data diolah, 2022		

Dalam penelitian ini dapat diamati bahwa dari 159 orang, 46 orang (28,93%) pada rentang usia 41-45 mendominasi penelitian ini. Selanjutnya diikuti oleh responden berusia 46-50 tahun dan 56-60 tahun, masing-masing sebanyak 20 orang (12,58%). Paling sedikit yakni responden berusia 20-25 tahun hanya 1 orang saja atau 0,63%.

#### **4.2.3. Klasifikasi Responden Menurut Pendidikan Terakhir**

Dalam penelitian ini, aparat desa dikelompokkan menurut tingkat pendidikan yang ditempuh seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 4** Tabel Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SD	0	0,00%
SMP/ sederajat	1	0,63%
SMA	51	32,08%
Diploma	12	7,55%
S1	86	54,09%
S2	9	5,66%
S3	0	0,00%
Profesi	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>100,00%</b>
Sumber: Data diolah, 2022		

Berdasarkan hasil di atas, dapat diamati bahwa aparat desa yang turut mengelola dana desa didominasi oleh lulusan Sarjana/ sederajat sebanyak 86 orang

atau 54,09%. Kemudian disusul oleh lulusan SMA sebanyak 51 orang atau 32,08%. Serta paling sedikit lulusan SMP/ sederajat yang hanya 1 orang atau 0,63%.

#### 4.2.4. Klasifikasi Responden Menurut Jabatan

Tabel 4.5 di bawah ini merupakan klasifikasi aparat desa menurut jabatan yang diampunya.

**Tabel 4. 5** Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kepala Desa	50	31,45%
Sekretaris Desa	59	37,11%
Kaur Keuangan	50	31,45%
Total	159	100,00%
Sumber: Data diolah, 2022		

Dalam penelitian ini menunjukkan aparat desa didominasi oleh sekretaris desa sebanyak 59 orang (37,11%), selanjutnya kepala desa sebanyak 50 orang (31,45%), dan kepala urusan keuangan sebanyak 50 orang (31,45%).

#### 4.2.5. Klasifikasi Responden Menurut Lama Menjabat

Penelitian ini juga mengelompokkan responden menurut lama jabatannya. Terdapat tiga kategori yakni kurang dari lima tahun, lima sampai dengan 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Pengelompokan tersebut dapat dilihat sebagaimana tertera dalam tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4. 6** Penggolongan Responden Menurut Lama Jabatan

<b>Lama Menjabat</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kurang dari 5 tahun	51	32,08%
5-10 tahun	62	38,99%
Lebih dari 10 tahun	46	28,93%
Sumber: Data diolah, 2022		

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa aparat desa dalam penelitian ini paling banyak telah menjabat selama lima hingga sepuluh tahun yakni sebesar

38,99% atau 62 orang. Sedangkan yang menjabat kurang dari lima tahun sebesar 32,08% atau 51 orang serta lebih dari sepuluh tahun sebesar 28,93% atau 46 orang.

#### 4.2.6. Klasifikasi Responden Menurut Kelurahan

Tabel 4.7 merupakan daftar Kantor Kelurahan di Kabupaten Sleman yang digunakan sebagai subyek penelitian. Terdapat 159 responden yang tersebar di 49 kelurahan.

**Tabel 4. 7** Daftar Kelurahan Subyek Penelitian

<b>Nama Kelurahan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Margodadi	3	1,89%
Margomulyo	3	1,89%
Margoluwih	3	1,89%
Tirtoadi	3	1,89%
Tlogoadi	3	1,89%
Margokaton	3	1,89%
Margoagung	2	1,26%
Sendangrejo	3	1,89%
Sendangarum	1	0,63%
Sumberadi	3	1,89%
Sumberrahayu	3	1,89%
Donoharjo	2	1,26%
Balecatur	3	1,89%
Ambarketawang	1	0,63%
Nogotirto	3	1,89%
Triharjo	3	1,89%
Sariharjo	2	1,26%
Margorejo	3	1,89%
Banyurejo	3	1,89%
Sidoagung	3	1,89%
Sinduharjo	3	1,89%
Sardonoharjo	3	1,89%
Caturharjo	3	1,89%
Banyuraden	3	1,89%
Tambakrejo	2	1,26%

Tabel 4. 7 Lanjutan

<b>Nama Kelurahan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Sendangmulyo	3	1,89%
Sidoarum	3	1,89%
Sidomoyo	3	1,89%
Sidomulyo	3	1,89%
Sidoluhur	3	1,89%
Sendangsari	3	1,89%
Sendangagung	3	1,89%
Sumberarum	3	1,89%
Pandowoharjo	3	1,89%
Caturtunggal	3	1,89%
Umbulmartani	3	1,89%
Donokerto	3	1,89%
Bangunkerto	3	1,89%
Merdikorejo	3	1,89%
Lumbangrejo	3	1,89%
Pondokrejo	3	1,89%
Sumberrejo	3	1,89%
Sidorejo	3	1,89%
Trihanggo	3	1,89%
Sendangadi	3	1,89%
Hargobinangun	3	1,89%
Pakembinangun	3	1,89%
Sindumartani	3	1,89%
Bimomartani	2	1,26%
Widodomartani	2	1,26%
Sukoharjo	3	1,89%
Sumbersari	2	1,26%
Sidokarto	1	0,63%
Mororejo	1	0,63%
Harjobinangun	3	1,89%
Purwobinangun	3	1,89%
Trimulyo	3	1,89%
Wedomartani	1	0,63%
Maguwoharjo	2	1,26%
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>100,00%</b>
Sumber: Data diolah (2022)		

#### 4.2.7. Klasifikasi Responden Menurut Kecamatan

Berikut di bawah ini tabel 4.8 menggambarkan rekapitulasi responden berdasarkan kecamatan tempat bekerja. Kuesioner telah didistribusikan ke 13 kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman.

**Tabel 4. 8** Klasifikasi Responden Menurut Kecamatan

Nama Kecamatan	Responden	Persentase
Seyegan	14	8,81%
Mlati	12	7,55%
Minggir	13	8,18%
Moyudan	8	5,03%
Ngaglik	13	8,18%
Gamping	13	8,18%
Sleman	12	7,55%
Tempel	21	13,21%
Godean	19	11,95%
Depok	5	3,14%
Ngemplak	11	6,92%
Turi	6	3,77%
Pakem	12	7,55%
Total	159	100,00%
Sumber: Data diolah (2022)		

#### 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.9 di bawah menjelaskan rata-rata dari penilaian responden terhadap butir-butir pernyataan atas variabel yang diajukan.

**Tabel 4. 9** Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N
Kompetensi Sumber Daya Manusia	5,142	0,597	1	6	159
Sistem Pengendalian Internal	5,240	0,521	2	6	159
Aplikasi SISKEUDES	5,119	0,589	2	6	159
Penyajian Laporan Keuangan	5,148	0,523	1	6	159
Akuntabilitas	5,349	0,538	2	6	159
Tingkat Pendidikan	4,325	1,008	2	6	159
Sumber: Data diolah (2022)					

Dari tabel tersebut dapat diketahui penilaian 159 responden. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki rata-rata penilaian sebesar 4,674 dan penyimpangan sebesar 0,597 dari rata-rata. Hal ini menunjukkan rata-rata responden menyetujui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki rata-rata penilaian sebesar 5,241 dan standar deviasi sebesar 0,521. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju atas pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas.

Selanjutnya variabel Aplikasi SISKEUDES mempunyai rata-rata penilaian sebesar 4,654 serta menunjukkan penyimpangan dari rata-rata sebesar 0,589. Hal ini dapat dimaknai bahwa responden menyetujui implementasi aplikasi SISKEUDES untuk membantu mewujudkan akuntabilitas dana desa.

Variabel Penyajian Laporan Keuangan mempunyai rata-rata 5,148 dan standar deviasi sebesar 0,523. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa responden rata-rata telah menyetujui akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

Variabel Tingkat pendidikan mempunyai rata-rata 4,324 dan penyimpangan sebesar 1,008. Hal ini dapat dimaknai bahwa responden memiliki tingkat pendidikan rata-rata strata satu.

Terakhir, variabel Akuntabilitas mempunyai rata-rata 5,349 dan standar deviasi yang menunjukkan penyimpangan sebesar 0,538. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyetujui penerapan akuntabilitas dimasing-masing Kelurahan.

#### **4.4 Uji Instrumen Penelitian**

Uji instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas yang mencakup validitas konvergen dan diskriminan, serta uji reliabilitas yang mencakup *Composite reliability* dan *Cronbach alpha*.

##### **4.4.1 Uji Validitas**

Dalam penelitian uji validitas dilakukan dengan metode konvergen dan diskriminan yang masing-masing dijelaskan di bawah ini.

###### **4.4.1.1 Validitas Konvergen**

Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *loading factor* tiap item pertanyaan. Pada penelitian ini *loading factor* ditetapkan pada batas 0,6 sehingga apabila melebihi nilai tersebut dikatakan valid. Hal ini didukung oleh pernyataan Abdillah dan Hartono (2015) yang menyatakan peneliti sebaiknya tidak perlu menghapus *loading factor* antara 0,5 – 0,6. Kemudian validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dapat dimaknai sebagai nilai rata-rata tertinggi dari kuadrat *loading* sebuah indikator yang terkait dengan konstruk (Hair Jr *et al.*, 2021). Jika nilai AVE melebihi 0,5 dikatakan valid (Putra, 2022).

Berdasarkan hasil pengujian tahap pertama ditemukan tiga indikator yang tidak memenuhi batas yang telah ditentukan yakni  $< 0,6$  meliputi PLK 5 (0,567), PLK 10 (0,510), dan SPI 1 (0,590). Indikator tersebut dikeluarkan dari model

kemudian dilakukan pengujian ulang untuk meyakinkan apakah terdapat indikator lain yang belum sesuai.

Setelah pengujian kedua, nilai KOM 6 dihapuskan karena nilai AVE masih berada di bawah 0,5. Kemudian dilakukan pengujian kembali untuk tahap ketiga. Terdapat 1 variabel yaitu KOM 5 (0,579) yang perlu dihapuskan karena nilai *loading factor* berada di bawah batas yang ditetapkan. Karena nilai tersebut mempunyai *loading factor* yang kurang dari 0,6 kemudian dilakukan pengujian tahap keempat. Semua indikator dalam pengujian keempat kini sudah memenuhi nilai *loading factor* yang ditetapkan ( $>0,6$ ) dan nilai AVE ( $>0,5$ ). Tabel 4.10 di bawah ini disajikan untuk menilik lebih jelas nilai *loading factor* dan AVE.

**Tabel 4. 10** Nilai *Outer Loading* dan AVE

Variabel	Item	<i>Loading factor</i>	AVE	Keterangan
Komunikasi	KOM1	0,761	0,522	Valid
	KOM10	0,691		Valid
	KOM2	0,804		Valid
	KOM3	0,720		Valid
	KOM4	0,654		Valid
	KOM7	0,654		Valid
	KOM8	0,700		Valid
Moderasi	MODERATING	1,000	1,000	Valid
Penyajian Laporan Keuangan	PLK1	0,693	0,583	Valid
	PLK11	0,751		Valid
	PLK12	0,795		Valid
	PLK2	0,793		Valid
	PLK3	0,802		Valid
	PLK4	0,825		Valid
	PLK6	0,736		Valid
	PLK7	0,608		Valid
	PLK8	0,792		Valid
PLK9	0,816	Valid		
Sistem Keuangan Desa	SKS1	0,669	0,594	Valid
	SKS10	0,797		Valid
	SKS2	0,834		Valid
	SKS3	0,833		Valid



**Tabel 4. 10** Lanjutan

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>Loading factor</b>	<b>AVE</b>	<b>Keterangan</b>
Sistem Keuangan Desa	SKS4	0,800	0,513	Valid
	SKS5	0,639		Valid
	SKS6	0,793		Valid
	SKS7	0,662		Valid
	SKS8	0,807		Valid
	SKS9	0,838		Valid
Sistem Pengendalian Internal	SPI10	0,722	0,632	Valid
	SPI11	0,732		Valid
	SPI12	0,695		Valid
	SPI13	0,698		Valid
	SPI14	0,641		Valid
	SPI2	0,784		Valid
	SPI3	0,729		Valid
	SPI4	0,716		Valid
	SPI5	0,689		Valid
	SPI6	0,702		Valid
	SPI7	0,722		Valid
	SPI8	0,779		Valid
SPI9	0,650	Valid		
Akuntabilitas	AK1	0,789	1,000	Valid
	AK10	0,661		Valid
	AK2	0,846		Valid
	AK3	0,873		Valid
	AK4	0,818		Valid
	AK5	0,769		Valid
	AK6	0,823		Valid
	AK7	0,828		Valid
	AK8	0,784		Valid
AK9	0,738	Valid		
	KOM * Tingkat Pendidikan	1,113	1,000	Valid

Dengan melihat hasil tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah valid dan memenuhi kriteria validitas konvergen.

#### 4.4.1.2 Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan ini menghitung suatu konstruks yang secara empiris mempunyai perbedaan dari konstruk lain dalam model struktural (Hair Jr *et al.*,

2021). Validitas diskriminan dilihat dari nilai *cross loading* masing-masing variabel. Apabila nilai *cross loading* indikator mempunyai nilai tertinggi dikomparasikan dengan konstruk indikator lain maka dapat dinyatakan valid (Hair *et al.*, 2014).

**Tabel 4. 11** Nilai *Cross Loading*

	AK	KOM	Moderating Effect 1	PLK	SKS	SPI	Tingkat Pendidikan
AK1	0,789	0,644	0,036	0,490	0,469	0,570	0,099
AK10	0,661	0,497	-0,100	0,417	0,359	0,494	0,131
AK2	0,846	0,576	0,052	0,519	0,443	0,602	0,152
AK3	0,873	0,633	-0,045	0,507	0,406	0,614	0,112
AK4	0,818	0,599	0,016	0,451	0,388	0,551	0,117
AK5	0,768	0,504	-0,005	0,526	0,383	0,591	0,049
AK6	0,823	0,566	-0,019	0,419	0,456	0,563	0,167
AK7	0,828	0,590	-0,098	0,506	0,446	0,588	0,138
AK8	0,784	0,578	-0,077	0,566	0,478	0,566	0,107
AK9	0,738	0,519	-0,054	0,474	0,502	0,434	0,095
KOM * Tingkat Pendidikan	-0,035	-0,153	1,000	-0,029	0,012	-0,025	-0,106
KOM1	0,625	0,761	-0,025	0,529	0,549	0,501	0,065
KOM10	0,502	0,691	-0,307	0,434	0,284	0,536	0,233
KOM2	0,575	0,804	0,025	0,504	0,478	0,541	0,078
KOM3	0,490	0,720	-0,173	0,411	0,498	0,446	0,247
KOM4	0,388	0,654	-0,177	0,404	0,358	0,462	0,162
KOM7	0,399	0,654	-0,193	0,382	0,217	0,431	0,183
KOM8	0,417	0,700	-0,149	0,416	0,330	0,439	0,124
KOM9	0,660	0,781	-0,006	0,566	0,411	0,629	0,110
PLK1	0,371	0,415	-0,063	0,693	0,349	0,561	0,043
PLK11	0,450	0,508	-0,032	0,751	0,627	0,520	0,025
PLK12	0,425	0,471	0,022	0,795	0,510	0,576	-0,059
PLK2	0,540	0,509	-0,011	0,793	0,481	0,678	0,024
PLK3	0,496	0,461	-0,030	0,802	0,425	0,606	-0,013
PLK4	0,421	0,439	0,020	0,825	0,437	0,567	-0,063
PLK6	0,432	0,561	0,001	0,736	0,475	0,510	-0,008
PLK7	0,383	0,450	-0,078	0,608	0,437	0,491	-0,005
PLK8	0,538	0,564	-0,005	0,792	0,495	0,589	0,014
PLK9	0,563	0,497	-0,053	0,816	0,623	0,594	0,036
SKS1	0,363	0,344	0,002	0,243	0,669	0,217	0,140
SKS10	0,518	0,492	0,007	0,612	0,797	0,508	0,103

**Tabel 4. 11 Lanjutan**

	AK	KOM	Moderating Effect 1	PLK	SKS	SPI	Tingkat Pendidikan
SKS2	0,476	0,484	0,001	0,585	0,834	0,501	0,146
SKS3	0,498	0,454	0,030	0,481	0,833	0,387	0,169
SKS4	0,421	0,468	0,062	0,565	0,800	0,362	0,115
SKS5	0,196	0,209	0,008	0,274	0,639	0,154	0,079
SKS6	0,384	0,404	-0,025	0,592	0,793	0,403	0,078
SKS7	0,312	0,287	-0,001	0,319	0,662	0,228	0,076
SKS8	0,369	0,408	-0,015	0,510	0,807	0,367	0,049
SKS9	0,497	0,560	0,014	0,592	0,838	0,501	0,056
SPI10	0,484	0,475	0,072	0,592	0,273	0,723	0,122
SPI11	0,544	0,481	-0,009	0,557	0,369	0,734	0,128
SPI12	0,454	0,469	-0,020	0,510	0,317	0,697	0,044
SPI13	0,502	0,463	0,011	0,565	0,435	0,700	0,090
SPI14	0,555	0,553	-0,042	0,505	0,357	0,643	0,087
SPI2	0,602	0,586	0,001	0,624	0,359	0,780	0,065
SPI3	0,520	0,592	-0,216	0,583	0,367	0,730	0,101
SPI4	0,408	0,517	-0,172	0,482	0,256	0,717	0,104
SPI5	0,390	0,366	0,038	0,534	0,326	0,690	0,076
SPI6	0,469	0,476	-0,045	0,476	0,431	0,705	0,061
SPI7	0,508	0,470	0,025	0,496	0,398	0,734	0,050
SPI8	0,617	0,528	0,088	0,554	0,404	0,794	0,184
SPI9	0,399	0,463	0,003	0,471	0,297	0,653	0,101
Tingkat pendidikan	0,147	0,197	-0,106	0,001	0,134	0,132	1,000

Sumber: Data diolah (2022)

Kemudian validitas diskriminan juga dapat dilihat dari nilai *Hetero Monorait Ratio* (HTMT). Batasan nilai HTMT yakni berada di bawah 0,85 dan 0,90 (Hair *et al.*, 2020). Apabila nilai HTMT lebih besar berarti telah memenuhi validitas diskriminan. Hasil analisis HTMT dijelaskan pada tabel 4.12 di bawah ini.

**Tabel 4. 12 Nilai HTMT**

	AK	KOM	MOD	PLK	SKS	SPI	Tingkat Pendidikan
AK							
KOM	0,777						
Moderating Effect 1	0,066	0,196					
PLK	0,655	0,704	0,043				
SKS	0,565	0,581	0,022	0,669			

**Tabel 4. 12 Lanjutan**

	AK	KOM	MOD	PLK	SKS	SPI	Tingkat Pendidikan
SPI	0,746	0,765	0,083	0,810	0,508		
Tingkat Pendidikan	0,152	0,223	0,106	0,040	0,137	0,136	
Sumber: Data diolah (2022)							

Semua variabel dalam dalam penelitian ini mempunyai nilai di bawah 0,9 sehingga telah memenuhi validitas diskriminan.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas mengacu pada konsistensi atas jawaban responden dalam menjawab pertanyaan (Ghozali, 2016). Pengujian reabilitas dapat dilakukan dengan pengujian *Composite reliability* dan *Cronbach alpha*. Chin (1995) menyatakan uji menggunakan *Cronbach alpha* mengukur nilai reliabilitas menggunakan batas bawah. Sedangkan *Composite reliability* mengukur nilai sebenarnya suatu konstruk (Abdillah dan Hartono, 2015). *Rule of thumb* untuk kedua metode uji reliabilitas adalah di atas 0,7 (Hair *et al.*, 2020).

**Tabel 4. 13 Pengujian Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
AK	0,934	0,945
KOM	0,870	0,897
Moderating Effect 1	1,000	1,000
PLK	0,920	0,933
SKS	0,924	0,935
SPI	0,921	0,932
Tingkat Pendidikan	1,000	1,000
Sumber: Data diolah (2022)		

Dari pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji reliabilitas karena semua variabel telah melebihi batas yang ditetapkan.

#### 4.5 Menilai Model Structural (*Inner model*)

Di dalam konteks PLS-SEM permodelan jalur memiliki dua elemen yakni *outer model* seperti yang dilakukan pada pengujian sebelumnya dan *inner model* atau yang dikenal dengan model struktural. Hair Jr *et al.* (2021) menyatakan *inner model* mengukur model struktural antar konstruk (variabel laten), yang identik dalam bentuk oval atau lingkaran. Pengujian ini dilakukan dengan memperhitungkan nilai koefisien determinasi (*R square*).

**Tabel 4. 14** Pengujian Koefisien Determinasi

	<b>R Square</b>
<b>AK</b>	0,615
Sumber: Data diolah (2022)	

Dari hasil pada tabel 4.14 di atas, nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini yakni 0,615 atau 61,50%. Dapat diinterpretasikan bahwa 61,50% variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa diterangkan oleh variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu Kompetensi sumber daya manusia, Sistem pengendalian internal, Implementasi SISKEUDES, dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan 38,50% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar studi ini.

#### 4.6 Uji *Goodness of Fit*

*Goodness of Fit* (GoF) pada penelitian ini diukur menurut parameter sebagai berikut. Nilai GoF sebesar 0,1 dapat diinterpretasikan dalam kategori GoF kecil. Nilai sebesar 0,23 termasuk dalam kategori GoF sedang sedangkan nilai 0,36 dapat diinterpretasikan dalam GoF besar (Cohen, 1988). Nilai GoF dalam penelitian ini diperhitungkan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$GoF = \sqrt{Com \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0,632 \times 0,615}$$

$$GoF = \sqrt{0,389}$$

$$GoF = 0,623$$

Berdasarkan penghitungan di atas, diperoleh nilai GoF sebesar 0,632. Hasil tersebut dapat termasuk dalam kategori GoF besar sehingga model penelitian ini memiliki model yang kuat.

#### 4.7 Uji Hipotesis Dan Pembahasan

Dari serangkaian pengujian yang telah dilakukan langkah berikutnya yaitu menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dilaksanakan menggunakan metode *bootstrapping* dalam *software* Smartpls. Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5% atau 0,05 yang apabila nilai *p-value* kurang dari tingkatan tersebut maka hipotesis dinyatakan berpengaruh. Nilai t-stat dimanfaatkan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Dinyatakan tidak didukung apabila nilai t-stat berada di antara rentang -1,96 dan 1,96. Kemudian koefisien jalur digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar variabel. Jika mendekati +1 menerangkan hubungan positif yang kuat dan sebaliknya (Putra, 2022). Tabel di bawah ini menggambarkan hasil pengujian hipotesis.

**Tabel 4. 15** Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	T-statistics	P values	Keterangan
KOM -> AK	0,394	4,058	0,000	Didukung
Moderating Effect 1 -> AK	0,029	0,681	0,496	Tidak Didukung
PLK -> AK	0,003	0,033	0,974	Tidak Didukung
SKS -> AK	0,147	1,672	0,095	Tidak Didukung
SPI -> AK	0,354	3,846	0,000	Didukung
Sumber: Data diolah (2022)				

Keterangan:

KOM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

Moderating effect : Tingkat Pendidikan terhadap Akuntabilitas  
 PLK : Penyajian Laporan Keuangan  
 SKS : SISKEUDES  
 SPI : Sistem pengendalian Internal

#### 4.7.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas

Menurut pengujian pada tabel di atas variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai koefisien jalur 0,394 (positif) dan nilai T-stat 4,058. Serta *p value* sebesar 0,000. Apabila nilai *p value* < 0,05 atau 5% dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel independent. Dari hasil tersebut nilai t-stat > 1,96 maka hipotesis pertama “Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa” **didukung**.

Hal ini menerangkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas akan terwujud salah satunya didukung dengan kompetensi aparat desa yang memadai. Kompetensi ini tercermin dalam kinerja aparat desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa dimungkinkan telah mengerti tugas pokok dan fungsi dalam mengelola dana desa. Kompetensi yang mumpuni akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa dan terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dapat diminimalisasi. Mengingat kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor krusial yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan salah satunya akuntabilitas. Hasil ini juga didukung oleh penelitian milik Dewi & Gayatri (2019); Luthfiani *et al.* (2020); dan Mada *et al.* (2017) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini berimplikasi pada pemerintah desa seharusnya lebih meningkatkan kompetensi aparat desa dengan pemberian pelatihan-pelatihan yang

berhubungan dengan pengelolaan dana desa, baik dari segi teoritis maupun praktik. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan untuk sekadar pada formalitas saja, tetapi juga nilai tambah aparat desa itu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas.

#### 4.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Dari penelaahan hasil di atas, diketahui nilai koefisien jalur pada variabel sistem pengendalian internal sejumlah 0,354. Nilai t-stat sejumlah 3,846 yang mana melebihi batas 1,96 dan nilai *p value* sejumlah 0,000 yang kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat tarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua “Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” **didukung**.

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini mengonfirmasi pelaksanaan sistem pengendalian internal selaras dengan peningkatan akuntabilitas. Makin baik penerapan SPI makin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berpengaruhnya sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimungkinkan karena pelaksanaan SPIP di kalurahan yang berada di Kabupaten Sleman telah optimal. Setiap aktivitas pengelolaan dana desa mulai dari *monitoring* dan evaluasi telah memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam SPIP. Identifikasi dan analisis risiko terhadap peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan telah dilakukan. Tidak hanya itu pula pengelolaan transaksi telah melalui otorisasi pihak yang berwenang sehingga informasi dalam laporan keuangan yang disajikan relevan dan berkualitas. Sistem pengendalian yang sesuai dan diwujudkan



dalam kinerja sehari-hari pemerintah desa akan menumbuhkan kembali keyakinan masyarakat. Penelitian ini selaras dengan studi sebelumnya milik Aziiz & Prastiti (2019), Arfiansyah (2020), dan Puspa & Prasetyo (2020).

Penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintah desa untuk terus meningkatkan dan selalu mengevaluasi sistem pengendalian internal yang telah berjalan. Tidak hanya itu, kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa yang berwenang dapat mengidentifikasi potensi risiko dan merencanakan bagaimana risiko tersebut dikendalikan.

#### **4.7.3 Pengaruh Implementasi SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya diperoleh nilai koefisien jalur variabel Implementasi SISKEUDES sebesar 0,147 dan nilai t-stat sebesar 1,672 yang berada di antara -1,96 dan 1,96. Nilai *p-value* variabel ini sebesar 0,095 (> 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga “Implementasi SISKEUDES berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” **tidak didukung**.

Dari hasil analisis di atas membuktikan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES di desa yang berada di Kabupaten Sleman tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implementasi SISKEUDES tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa terjadi karena aparat desa tidak memahami penggunaan aplikasi tersebut. Serta aplikasi tersebut susah digunakan untuk aparat desa yang memiliki usia dan latar belakang pendidikan yang tidak linear dengan pekerjaannya. Dengan usia yang sudah berumur dan tidak mempunyai pengetahuan terkait dasar-dasar akuntansi

menjadikan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP ini pemanfaatannya kurang optimal. Hasil ini didukung oleh penelitian Reu dan Lusdi (2021) yang menyatakan kehadiran aplikasi SISKEUDES yang digadang-gadang akan mewujudkan akuntabilitas dengan meminimalisasi informasi asimetris dan ketidaksesuaian laporan keuangan belum mampu dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Penelitian milik Amalya *et al.*, (2017) juga dapat mendukung hasil ini dengan menyebutkan implementasi SISKEUDES tidak berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa.

Hal ini berimplikasi pada pemerintah desa perlu memaksimalkan kebermanfaatan Aplikasi SISKEUDES di samping menguatkan sistem pengendalian internal. Aplikasi SISKEUDES dicita-citakan untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan ataupun kesalahan dalam input transaksi sehingga perlu dioptimalkan lagi.

#### **4.7.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas**

Hasil pengujian pada hipotesis keempat ini, variabel penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,003; nilai t-stat sebesar 0,033 ( $-1,96 < 0,033 < 1,96$ ), dan nilai p-value sebesar 0,974. Dari hasil tersebut menandakan bahwa hipotesis keempat “Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” **tidak didukung**.

Hal ini berarti penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak selaras dengan penelitian Hehanussa (2015) yang menerangkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tidak

berpengaruhnya penyajian laporan keuangan pengelolaan dana desa terjadi karena aparat desa dalam penelitian ini tidak memahami laporan keuangan dan dasar-dasar akuntansi. Untuk dapat memahami dasar-dasar pembukuan hingga penyajian laporan keuangan yang komprehensif membutuhkan waktu yang cukup lama. Ditambah dengan latar belakang pendidikan masing-masing aparat desa yang cukup beragam. Hal tersebut berakibat pada penyajian laporan keuangan tidak menjadi perhatian utama. Jalannya program menjadi orientasi utama sehingga laporan keuangan kemungkinan hanya menjadi pelengkap saja. Hasil ini didukung oleh studi milik Triyono *et al.* (2019) dan Azizah *et al.* (2015) yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil ini berimplikasi pada perlu pemerintah desa melalui perangkatnya untuk mulai menggunakan laporan keuangan pengelolaan dana desa untuk membantu pengambilan keputusan, misalnya dengan mengevaluasi proyek atau aktivitas tahunan yang dirasa tidak memberikan manfaat perlu dipertimbangkan kembali ataupun memetakan potensi-potensi pendapatan asli desa yang dapat dimaksimalkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan selain dari transfer pemerintah pusat ataupun daerah.

#### **4.7.5 Pengaruh Tingkat Pendidikan dalam Memperkuat Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas**

Dari hasil analisis sebelumnya, variabel tingkat pendidikan dalam memoderasi kompetensi mempunyai nilai koefisien jalur sebesar 0,029; nilai t-stat sebesar 0,681; serta *p value* sebesar 0,496 ( $> 0,05$ ). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa hipotesis kelima “Tingkat pendidikan menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa” **tidak didukung**.

Hal ini berarti tingkat pendidikan tidak menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak selaras dengan studi milik Cahyani *et al.* (2019). Tingkat pendidikan tidak menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa disebabkan aparat desa mempunyai latar belakang yang cukup beragam. Aparat desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) hingga strata dua (S2) sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami bagaimana sistem pekerjaan di pemerintah desa. Selain itu, tingkat pendidikan belum menjadi persyaratan dasar yang diperhatikan dalam penerimaan calon aparat desa. Tidak hanya itu, kompetensi aparat desa lebih banyak diperoleh dari pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian ini didukung oleh studi Nor *et al.* (2019) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini berimplikasi pada pemerintah desa perlu menambah pemberian pelatihan-pelatihan secara berkala dan terukur. Pembimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja aparat desa dalam mewujudkan akuntabilitas. Tidak hanya itu dapat dipertimbangkan pula, pemerintah desa dalam merekrut calon

aparatus desa yang baru dengan latar belakang pendidikan yang linear dengan bidangnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis dalam penelitian yang berjudul “Determinan Akuntabilitas Pengujian Dana Desa” dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan kompetensi aparat desa yang selama ini diperoleh dapat mendorong kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menerangkan bahwa pengaplikasian sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah desa mulai dari identifikasi risiko hingga pemantauan mendukung perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Implementasi SISKEUDES tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini berarti mengonfirmasi bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh aparat desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat menjadi salah satu perhatian bahwa penyajian laporan keuangan belum dapat mewujudkan

akuntabilitas pengelolaan dana desa mengingat akses terhadap laporan keuangan oleh masyarakat di beberapa desa masih terbatas.

5. Tingkat pendidikan tidak menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat desa tidak menguatkan kompetensi dikarenakan aparat desa lebih banyak memperoleh pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara berkala oleh pemerintah daerah.

## **5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian**

### **5.2.1 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kontribusi secara teoritis yakni penelitian terkait hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, implementasi SISKEUDES, penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel pemoderasi masih cukup jarang ditemui. Selanjutnya, didapatkan temuan bahwa variabel pemoderasi tingkat pendidikan tidak menguatkan variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **5.2.2 Implikasi Penelitian**

Penelitian ini memberikan implikasi praktis kepada pemerintah pusat melalui inspektorat perlu terus melakukan pengawasan berkala dan berkesinambungan terkait pengelolaan dana desa mengingat jumlah yang ditransfer untuk tiap tahunnya mengalami peningkatan dan merupakan ladang basah korupsi. Kemudian pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan pemerintah daerah dapat

menghimbau kepada aparat desa untuk menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Kemudian pemerintah pusat dapat menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengevaluasi pemberian dana desa apakah telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Selanjutnya untuk pemerintah desa desa dalam rangka pemerataan kompetensi sumber daya manusia perlu memberikan perhatian penuh saat proses rekrutmen dengan membuat persyaratan seperti mengetahui dasar-dasar akuntansi baik pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pemerintah pusat maupun daerah yang berwenang dapat memberikan prosedur ataupun kriteria-kriteria calon aparat desa. Hal tersebut dikarenakan saat peneliti mendistribusikan kuesioner, terdapat aparat desa yang tidak mengetahui istilah dalam dasar-dasar akuntansi. Selain itu, pelatihan dan pendampingan ini tidak hanya sebatas dalam penggunaan aplikasi saja namun juga pemberian pengetahuan dasar akuntansi mengingat hal tersebut menjadi pondasi untuk semua proses pengelolaan dana desa saja.

Terakhir, penelitian ini berimplikasi kepada masyarakat desa untuk selalu mengawasi jalannya pengelolaan dana desa dengan meminta laporan realisasi dana desa ataupun realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa untuk diunggah secara berkala melalui laman milik desa.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari secara penuh bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:



1. Umur beberapa kepala ataupun perangkat desa lebih dari enam puluh tahun. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh peneliti dengan membacakan setiap item kuesioner kepada responden tersebut.
2. Beberapa responden belum memahami dan mengerti istilah-istilah dari pertanyaan yang diajukan karena tidak didampingi oleh peneliti secara langsung. Hal tersebut dapat diatasi dengan peneliti menjelaskan istilah yang kurang dimengerti saat pengambilan kuesioner.
3. Prosedur untuk mengajukan surat izin penelitian di beberapa kelurahan cenderung berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

#### **5.4 Saran**

Demikian, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya.

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan Kepala Urusan Perencanaan sebagai responden karena perangkat desa tersebut juga mempunyai andil dalam pengelolaan dana desa.
2. Sebelum penelitian dilakukan sebaiknya peneliti melakukan observasi ataupun wawancara secara langsung di kelurahan untuk memastikan apakah penelitian sudah sesuai kondisi lapangan.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan menggunakan kombinasi cara pendistribusian kuesioner menggunakan *google form* dikarenakan beberapa responden mempunyai umur yang masih muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P. (2019). *ICW Temukan 252 Kasus Korupsi Dana Desa Sepanjang 2015-2018*. Tirto.Id. <https://tirto.id/icw-temukan-252-kasus-korupsi-dana-desa-sepanjang-2015-2018-eLLQ>
- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square-Alternatif Struktural Equation Modelling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (Ed 1). Andi Offset.
- Aji, M. R. (2019). *ICW Catat Lonjakan Kasus Korupsi Dana Desa*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1270010/icw-catat-lonjakan-kasus-korupsi-dana-desa/full&view=ok>
- Alam, M., Said, J., Azizal, M., & Aziz, A. (2019). Role of Integrity System , Internal Control System and Leadership Practices on the Accountability Practices in the Public Sectors of Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 955–976. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051>
- Amalya, T., Akram, & Pituringsih, E. (2017). Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward Accountability : Study on Village Governance in West Lombok Regency. *International Journal of Research in Advent Technology*, 5(12), 15–23.
- Ardianti, P. A., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839–2851.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Azizah, N., -, J., & Setiawan, A. R. (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.18382/jraam.v1i2.18>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System ( SISKEUDES ). *Journal of Accounting and*

- Investment*, 21(November). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Bowrin, A. R. (2004). Internal control in Trinidad and Tobago religious organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(1), 121–152. <https://doi.org/10.1108/09513570410525238>
- Cahyani, I., Hardiningsih, P., & Setiawati, I. (2019). Pengaruh Sumberdaya Aparatur Terhadap Akuntabilitas Dana Publik Dengan Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *Joint Proceedings*, 502–509.
- Cohen, J. (1988). Set Correlation and Contingency Tables. *Applied Psychological Measurement*, 12(4), 425–434. <https://doi.org/10.1177/014662168801200410>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (Twelfth). McGraw-Hill/Irwin.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th editio). SAGE Publications, Inc. All.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*, 19(3), 368–386. <https://doi.org/10.1080/03003939308433687>
- Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yoga Pratama.
- Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Hafit, M., Irianto, G., & Purwanti, L. (2018). Analysis of Government Internal Control System on Budget Implementation in Accordance with Government Regulation No 60 of 2008. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 253–272. <https://doi.org/10.26675/jabe.v2i2.11227>
- Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 109(August 2019), 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis (MVDA)* (Seventh Ed). Pearson Education Limited.

<https://doi.org/10.1002/9781118895238.ch8>

- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook. In *Springer*.
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). *Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability?* 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no4.223>
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 2, 82–90. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294>
- Permedagri No 20 tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018).
- Indriani, M., Nadirsyah, Fuadi, R., & Evayani. (2020). Can SISKEUDES support village governance in Aceh Province of Indonesia? *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743617>
- IPSASB. (2018). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2018 Edition: Vol. I*.
- Kemendes. (2019). *Penyaluran Dana Desa Tahun 2015 - 2019*.
- Kemenkeu. (2022). *Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). *Analysis of Factors Affecting Accountability in Village Fund Management in Central Lombok District*. 30(Juli), 1886–1899.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketu). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Penerbit Andi.
- Murina, S., & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 111–120.

- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2).
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (2003) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 1 (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, 1 (2014) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (2014) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah RI (2016).
- Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah (2021).
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–297.
- Putra, W. B. T. S. (2022). Problems, Common Beliefs and Procedures on the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Business Research. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v14i130367>
- Ramadhan, G. (2021). *Pemerintahan Jokowi Kucurkan Dana Desa Rp400,1 Triliun sejak 2015*. Tirto.Id. <https://tirto.id/pemerintahan-jokowi-kucurkan-dana-desa-rp4001-triliun-sejak-2015-gmrs>
- Reu, F. M., & Lusdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems*. In *Pearson* (14th editi). Pearson Education Limited.
- Said, J., & Alam, S. (2018). *Assessment of Accountability Practices in the Public Sector of Malaysia*. 13(1), 1–12.



- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research Methods for Business Students*. Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.1080/09523367.2012.743996>
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). The Effect of Leadership, Internal Control System and Organizational Commitment on Accountability of Village Financial Management. *Journal of Applied Management*, 18(3).
- Shikova, N. (2020). Competency-Based Management in Public Administration. In A. Farazmand (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1–6). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5\\_3923-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3923-1)
- Skorková, Z. (2016). Competency Models in Public Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230(May), 226–234. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.029>
- Sukriani, L., Eka Dianita Marvilianti Dewi, P., & Arie Wahyuni, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85–97.
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). *Effects of Leadership and Accounting Capacity on Accountability through the Quality of Financial Reporting by Public Organisations in Vietnam*. 15(3), 484–502. <https://doi.org/10.1108/JABS-02-2020-0077>
- Triyono, Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(September).
- UNESCO. (2011). The International Standard Classification of Education (ISCED) 2011. In *Prospects* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/BF02207511>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2022). Prevention Village Fund Fraud in Indonesia: Moral Sensitivity as a Moderating Variable. *Economies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10010026>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112.

## LAMPIRAN



## Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Perkenalkan saya Retno Puspito Sari, mahasiswa tingkat akhir Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang menyusun Tugas Akhir yang berjudul “Determinan Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa”.

Responden penelitian ini adalah perangkat desa yang turut mengelola dana desa yakni, kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan.

Sehubungan dengan perihal tersebut, saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini serta mengisi kuesioner sebenar-sebenarnya dan apa adanya demi membantu kesuksesan penelitian ini. Seluruh data responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Jika terdapat pertanyaan terkait dengan penelitian ini, Anda dapat menghubungi peneliti melalui email [18312004@students.uii.ac.id](mailto:18312004@students.uii.ac.id)

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam hormat,

Retno Puspito Sari



### Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I membaca dengan teliti setiap pertanyaan yang diajukan sehingga Anda mengerti.
2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan sebenar-benarnya.
3. Jika ada hal yang tidak dimengerti, silakan menghubungi peneliti melalui [18312004@students.uui.ac.id](mailto:18312004@students.uui.ac.id)

#### Bagian 1

##### Identitas Diri dan Informasi Penunjang

1. Nama: \_\_\_\_\_
2. Jenis Kelamin:
  - Perempuan
  - Laki-laki
3. Usia
  - 20 – 25
  - 26 – 30
  - 31 – 35
  - 36 – 40
  - 41 – 45
  - 46 – 50
  - 51 – 55
  - 56 – 60
  - Di atas 60 tahun
4. Pendidikan Terakhir
  - SD/Sederajat
  - SMP/Sederajat
  - SMA/Sederajat
  - Diploma/Sederajat
  - S1/Sederajat
  - S2/Sederajat
  - S3/Sederajat
  - Profesi
5. Jabatan
  - Kepala desa
  - Sekretaris Desa
  - Kepala Urusan Keuangan
6. Lama menjabat:
  - Kurang dari 5 tahun
  - 5 – 10 tahun
  - Lebih dari 10 tahun
7. Nama Kelurahan tempat bekerja:
8. Nama Kecamatan tempat bekerja:

Silakan jawab pernyataan-pernyataan di bawah dengan memberi tanda ceklis (✓) pada tempat yang tersedia untuk jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Agak tidak setuju	Agak setuju	Setuju	Sangat Setuju

*Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silakan menggunakan skala di atas.*

<b>Bagian 1</b>		<b>Kode AK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Penyusunan anggaran pemerintah desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya.							
2.	Pembuatan rencana kegiatan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran.							
3.	Pengajuan anggaran kegiatan yang menggunakan dana desa disertai dengan perencanaan yang diajukan sebagai dasar penyusunan APBDes.							
4.	Pengelolaan keuangan dana desa disusun secara jujur dan terhindar dari penyalahgunaan jabatan serta telah sesuai dengan regulasi terkait.							
5.	Perangkat Desa selalu melakukan pengecekan terhadap jalannya program.							
6.	Pencatatan belanja, pendapatan, dan pembiayaan harus disertai dengan dokumen atau bukti pelaksanaan anggaran.							
7.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Dana Desa kepada bupati/walikota.							
8.	Perangkat Desa melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.							
9.	Evaluasi kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.							
10.	Tahapan pengelolaan keuangan dana desa melibatkan unsur-unsur masyarakat.							

<b>Bagian 2</b>		<b>Kode KOM</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Saya memahami tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.							
2.	Saya memahami semua proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dana desa.							
3.	Saya mempunyai pemahaman akuntansi dalam mengelola dana desa.							



<b>Bagian 3</b>		<b>Kode SPI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
11.	Menyediakan informasi yang relevan, berkualitas, untuk mendukung pengendalian internal							
12.	Komunikasi antar pihak dilakukan secara terbuka dan efektif dengan pihak lain seperti rekan kerja, masyarakat, dan badan pengawas intern							
13.	Pemerintah desa selalu melakukan evaluasi dan supervisi atas sistem pengendalian internal yang berjalan secara berkala.							
14.	Pemerintah desa selalu menindaklanjuti dari setiap saran dan temuan yang diberikan oleh inspektorat							

<b>Bagian 4</b>		<b>Kode SKS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Aplikasi SISKEUDES mudah digunakan dan dipahami							
2.	Aplikasi SISKEUDES meringankan beban pekerjaan dalam pembuatan laporan keuangan desa							
3.	Penggunaan Aplikasi SISKEUDES mengurangi resiko kesalahan pelaporan keuangan desa							
4.	Aplikasi SISKEUDES menghilangkan resiko penyimpangan dan menghindarkan dari manipulasi pertanggungjawaban belanja desa.							
5.	Aplikasi SISKEUDES memiliki fitur-fitur layanan lengkap sesuai kebutuhan desa							
6.	Aplikasi SISKEUDES sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa							
7.	Aplikasi SISKEUDES memiliki pembaruan yang berkelanjutan							
8.	Aplikasi SISKEUDES dimanfaatkan secara benar dan digunakan secara berkala dan berkesinambungan.							
9.	Aplikasi SISKEUDES digunakan secara terbuka dan akuntabel.							
10	Aplikasi SISKEUDES menambah akuntabilitas pengelolaan dana desa.							

<b>Bagian 5</b>		<b>Kode PLK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Laporan keuangan yang disusun bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.							

<b>Bagian 5</b>		<b>Kode PLK</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah berisi informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.						
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah teruji kebenarannya.						
4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.						
5.	Informasi yang telah disusun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.						
6.	Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).						
7.	Laporan keuangan yang telah disusun disajikan secara tepat waktu sebagai bahan pengambil keputusan.						
8.	Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan di masa lalu dan memprediksi kejadian yang akan datang.						
9.	Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).						
10.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang telah disusun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.						
11.	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.						
12.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.						
13.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinyatakan dengan bentuk ataupun istilah yang telah disesuaikan.						

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Ringroad Utara, Condong Gatur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. fe@uii.ac.id  
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 1386/DEK/10/Div.URT/IV/2022  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth  
Pimpinan  
Kelurahan yang berada di Kabupaten Sleman

*Assalamu alaikum wr.wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Retno Puspito Sari  
No. Mahasiswa : 18312004  
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman / 11 Oktober 1999  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang : Strata 1 (S1)  
Alamat : Krapyak VII, Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**"Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa"**

Dosen Pembimbing : Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(SI), Ph.D., CFA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 April 2022  
Dekan,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.  
NIK: 933130101

### Lampiran 3 Data Responden Variabel Akuntabilitas

No	AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	AK7	AK8	AK9	AK10
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	6	6	6	6	5	6	6	5	5	6
3	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
4	5	6	6	6	6	6	5	6	5	5
5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	5	6	6	6	6	6	5	6	5	5
7	5	6	5	6	6	6	6	5	5	5
8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
10	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
15	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6
16	5	5	5	6	6	5	6	5	5	5
17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5
20	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	5	5	5	5	5	5	6	5	5	4
23	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6
24	6	6	6	6	5	6	6	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	6	6	6	6	5	6	6	5	6	6
29	6	6	6	6	5	6	6	5	5	6
30	5	5	5	6	5	6	5	4	5	4
31	5	6	5	6	5	6	5	5	5	5
32	5	5	5	5	6	5	5	5	4	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	5	6	6	5	6	6	6	5	5	5
39	6	6	6	6	5	6	5	6	6	5







No	AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	AK7	AK8	AK9	AK10
122	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
123	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
124	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5
125	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
126	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
129	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6
130	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
131	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
132	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
133	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
134	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
135	6	6	6	6	6	6	6	5	4	5
136	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
137	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
138	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
139	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
140	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6
141	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
142	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
143	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
144	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
145	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
146	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
147	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5
148	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
149	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
151	6	6	6	6	5	6	6	5	5	6
152	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
153	6	5	6	6	5	6	5	5	5	5
154	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
155	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
156	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
157	5	5	6	6	5	6	5	5	5	5
158	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
159	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5

**Lampiran 4 Data Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

NO	KOM 1	KOM 2	KOM 3	KOM 4	KOM 5	KOM 6	KOM 7	KOM 8	KOM 9	KOM 10
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	6	6	5	5	5	6	5	6	5
3	5	6	6	6	6	6	6	5	6	5
4	6	5	5	4	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
6	6	5	5	3	4	5	5	5	5	5
7	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5
8	6	5	5	5	5	5	4	5	6	6
9	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5
14	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5
15	5	5	4	4	5	4	5	5	6	6
16	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5
20	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5
21	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5
22	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5
23	5	5	5	4	5	5	5	5	5	6
24	5	5	4	4	5	5	5	6	6	6
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
27	6	5	5	5	6	5	5	6	6	6
28	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5
29	5	6	5	5	5	5	5	6	6	5
30	5	5	5	4	5	6	4	4	5	5
31	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6
39	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6
40	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5

NO	KOM 1	KOM 2	KOM 3	KOM 4	KOM 5	KOM 6	KOM 7	KOM 8	KOM 9	KOM 10
41	6	6	6	5	6	6	5	5	6	6
42	5	5	5	4	5	5	4	5	6	6
43	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5
44	5	5	4	2	5	5	3	4	5	1
45	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
46	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
47	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
48	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
49	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5
50	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
51	5	5	6	6	5	6	5	6	6	6
52	5	5	4	5	4	4	6	6	6	6
53	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
55	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6
56	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6
63	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6
64	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
66	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5
67	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5
68	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
69	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5
70	6	5	5	4	5	5	5	5	5	6
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
73	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
74	6	5	4	4	5	5	5	5	5	5
75	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
76	6	5	5	5	6	5	4	5	6	5
77	5	5	4	4	4	4	4	5	5	6
78	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5
81	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6

NO	KOM 1	KOM 2	KOM 3	KOM 4	KOM 5	KOM 6	KOM 7	KOM 8	KOM 9	KOM 10
82	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
87	5	5	4	2	5	4	5	5	5	5
88	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5
89	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5
90	6	5	5	6	6	6	5	5	5	6
91	6	6	5	5	5	5	5	5	6	5
92	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
93	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6
94	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
96	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
97	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5
98	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5
99	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
101	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
102	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6
103	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
104	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5
105	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
106	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
107	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
108	5	5	5	3	5	5	4	5	5	4
109	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
111	6	6	5	5	5	6	5	5	5	6
112	5	5	5	5	5	6	5	6	5	6
113	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5
114	5	5	4	5	5	4	5	6	5	5
115	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4
116	5	4	5	5	5	6	5	5	5	5
117	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
118	6	5	5	5	5	5	5	6	5	6
119	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
120	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	5	5	4	4	4	4	5	5	6	6
122	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5

NO	KOM 1	KOM 2	KOM 3	KOM 4	KOM 5	KOM 6	KOM 7	KOM 8	KOM 9	KOM 10
123	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
124	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5
125	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
126	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
127	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5
128	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5
129	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6
130	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6
131	6	6	6	6	6	6	6	5	6	5
132	6	6	6	5	5	4	5	6	6	6
133	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6
134	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
135	6	5	5	5	5	4	5	5	5	5
136	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
137	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
138	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
139	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
140	6	5	6	5	5	6	6	6	5	5
141	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
142	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6
143	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5
144	5	5	5	4	5	5	4	4	5	6
145	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
146	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
147	5	5	5	5	5	4	6	6	6	6
148	5	5	5	5	5	5	6	5	6	6
149	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
150	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
151	6	6	6	5	6	6	5	5	6	6
152	6	6	5	5	4	5	5	6	5	6
153	6	5	6	6	6	6	5	6	6	5
154	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
155	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
156	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
157	6	6	5	5	5	5	4	5	6	6
158	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
159	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5

### Lampiran 5 Data Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal

NO	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	SPI11	SPI12	SPI13	SPI14
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	6
3	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6
4	4	5	5	5	5	6	6	5	5	5	6	5	5	5
5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6
6	4	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5
7	6	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	6
8	4	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6
9	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	6	6	6
16	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5
20	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	6	5	6	5
21	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6
22	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	6
23	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	6	5	6	6	6	6	6	6	4	5	6	5	6
28	4	6	6	6	5	6	6	6	5	5	6	6	6	6
29	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5
30	5	5	5	6	5	4	6	5	5	5	5	6	6	5
31	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	5	6	5	6	5	6	5	5	5	6	6	5	5	6
39	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	6	5	5	6
40	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5













No	SKS1	SKS2	SKS3	SKS4	SKS5	SKS6	SKS7	SKS8	SKS9	SKS10
82	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
88	6	6	6	5	5	5	5	5	6	5
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
90	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
91	6	5	6	5	5	5	6	6	6	6
92	5	6	6	6	5	6	6	5	6	6
93	5	6	6	6	4	5	5	5	6	6
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
98	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
101	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
102	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
103	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
104	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
105	5	5	6	6	6	6	5	5	6	6
106	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
107	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5
108	5	5	5	5	5	6	5	6	6	6
109	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5
110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
111	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
112	5	5	6	6	5	5	5	6	5	6
113	6	6	5	5	6	5	5	5	5	6
114	5	5	4	5	5	5	6	5	5	4
115	5	4	4	5	4	5	5	6	5	6
116	5	5	4	5	5	5	6	5	5	5
117	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
118	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
119	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
120	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4



**Lampiran 7 Data Responden Variabel Penyajian Laporan Keuangan Dan Tingkat Pendidikan**

No	PLK 1	PLK 2	PLK 3	PLK 4	PLK 5	PLK 6	PLK 7	PLK 8	PLK 9	PLK 10	PLK 11	PLK 12	MOD
1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4
5	6	6	6	5	6	5	6	6	6	5	5	5	5
6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
7	6	6	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	3
8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6	6	5
9	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	5	5
10	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	3
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
15	5	6	6	6	6	5	6	6	6	5	5	5	3
16	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
19	2	3	5	5	6	6	6	5	5	4	5	5	3
20	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5
21	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	3
22	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3
26	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
27	6	6	5	6	6	6	6	6	5	5	6	5	5
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	5	6	5	5	6	5	5	6	5	4	5	5	5
30	4	5	5	5	6	4	5	4	5	4	5	5	3
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	5	6	5	5	5	6	5	5	5	4	5	5	5
39	5	5	6	6	6	6	5	5	6	5	5	5	5









## Lampiran 8 Klasifikasi Data

### 1. Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	127	79,87%
Perempuan	32	20,13%
Sumber: Data diolah (2022)		

### 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-25	1	0,63%
26-30	15	9,43%
31-35	10	6,29%
36-40	13	8,18%
41-45	46	28,93%
46-50	20	12,58%
51-55	19	11,95%
56-60	20	12,58%
Di atas 60 tahun	15	9,43%
Total	159	100,00%
Sumber: Data diolah, 2022		

### 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase
SD	0	0,00%
SMP/ sederajat	1	0,63%
SMA	51	32,08%
Diploma	12	7,55%
S1	86	54,09%
S2	9	5,66%
S3	0	0,00%
Profesi	0	0,00%
Total	159	100,00%
Sumber: Data diolah, 2022		

### 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kepala Desa	50	31,45%
Sekretaris Desa	59	37,11%
Kaur Keuangan	50	31,45%
Total	159	100,00%
Sumber: Data diolah, 2022		

### 5. Penggolongan Responden Menurut Lama Jabatan

Lama menjabat	Jumlah	Persentase
Kurang dari 5 tahun	51	32,08%
5-10 tahun	62	38,99%
Lebih dari 10 tahun	46	28,93%
Sumber: Data diolah, 2022		

### 6. Klasifikasi Responden Menurut Kecamatan

Nama Kecamatan	Responden	Persentase
Seyegan	14	8,81%
Mlati	12	7,55%
Minggir	13	8,18%
Moyudan	8	5,03%
Ngaglik	13	8,18%
Gamping	13	8,18%
Sleman	12	7,55%
Tempel	21	13,21%
Godean	19	11,95%
Depok	5	3,14%
Ngemplak	11	6,92%
Turi	6	3,77%
Pakem	12	7,55%
Total	159	100,00%
Sumber: Data diolah (2022)		

## 7. Daftar Kelurahan Subyek Penelitian

Nama Kelurahan	Responden	Persentase
Margodadi	3	1,89%
Margomulyo	3	1,89%
Margoluwih	3	1,89%
Tirtoadi	3	1,89%
Tlogoadi	3	1,89%
Margokaton	3	1,89%
Margoagung	2	1,26%
Sendangrejo	3	1,89%
Sendangarum	1	0,63%
Sumberadi	3	1,89%
Sumberrahayu	3	1,89%
Donoharjo	2	1,26%
Balecatur	3	1,89%
Ambarketawang	1	0,63%
Nogotirto	3	1,89%
Triharjo	3	1,89%
Sariharjo	2	1,26%
Margorejo	3	1,89%
Banyurejo	3	1,89%
Sidoagung	3	1,89%
Sinduharjo	3	1,89%
Sardonoharjo	3	1,89%
Caturharjo	3	1,89%
Banyuraden	3	1,89%
Tambakrejo	2	1,26%
Sendangmulyo	3	1,89%
Sidoarum	3	1,89%
Sidomoyo	3	1,89%
Sidomulyo	3	1,89%
Sidoluhur	3	1,89%
Sendangsari	3	1,89%
Sendangagung	3	1,89%
Sumberarum	3	1,89%
Pandowoharjo	3	1,89%
Caturtunggal	3	1,89%
Umbulmartani	3	1,89%
Donokerto	3	1,89%
Bangunkerto	3	1,89%
Merdikorejo	3	1,89%

<b>Nama Kelurahan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Lumbungrejo	3	1,89%
Pondokrejo	3	1,89%
Sumberrejo	3	1,89%
Sidorejo	3	1,89%
Trihanggo	3	1,89%
Sendangadi	3	1,89%
Hargobinangun	3	1,89%
Pakembinangun	3	1,89%
Sindumartani	3	1,89%
Bimomartani	2	1,26%
Widodomartani	2	1,26%
Sukoharjo	3	1,89%
Sumbersari	2	1,26%
Sidokarto	1	0,63%
Mororejo	1	0,63%
Harjobinangun	3	1,89%
Purwobinangun	3	1,89%
Trimulyo	3	1,89%
Wedomartani	1	0,63%
Maguwoharjo	2	1,26%
Total	159	100,00%
Sumber: Data diolah (2022)		

## Lampiran 9 Statistik Deskriptif

### 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	N
Kompetensi Sumber Daya Manusia	5,142	0,597	1	6	159
Sistem Pengendalian Internal	5,240	0,521	2	6	159
Aplikasi SISKEUDES	5,119	0,589	2	6	159
Penyajian Laporan Keuangan	5,148	0,523	1	6	159
Akuntabilitas	5,349	0,538	2	6	159
Tingkat Pendidikan	4,325	1,008	2	6	159
Sumber: Data diolah (2022)					

### 2. Nilai Outer Loading dan AVE

Variabel	Item	Loading factor	AVE	Keterangan
Komunikasi	KOM1	0,761	0,522	Valid
	KOM10	0,691		Valid
	KOM2	0,804		Valid
	KOM3	0,720		Valid
	KOM4	0,654		Valid
	KOM7	0,654		Valid
	KOM8	0,700		Valid
Moderasi	MODERATING	1,000	1,000	Valid
Penyajian Laporan Keuangan	PLK1	0,693	0,583	Valid
	PLK11	0,751		Valid
	PLK12	0,795		Valid
	PLK2	0,793		Valid
	PLK3	0,802		Valid
	PLK4	0,825		Valid
	PLK6	0,736		Valid
	PLK7	0,608		Valid
	PLK8	0,792		Valid
PLK9	0,816	Valid		
Sistem Keuangan Desa	SKS1	0,669	0,594	Valid
	SKS10	0,797		Valid
	SKS2	0,834		Valid
	SKS3	0,833		Valid
	SKS4	0,800		Valid
	SKS5	0,639		Valid
	SKS6	0,793		Valid
	SKS7	0,662		Valid
SKS8	0,807	Valid		

	SKS9	0,838		Valid
Sistem Pengendalian Internal	SPI10	0,722	0,513	Valid
	SPI11	0,732		Valid
	SPI12	0,695		Valid
	SPI13	0,698		Valid
	SPI14	0,641		Valid
	SPI2	0,784		Valid
	SPI3	0,729		Valid
	SPI4	0,716		Valid
	SPI5	0,689		Valid
	SPI6	0,702		Valid
	SPI7	0,722		Valid
	SPI8	0,779		Valid
	SPI9	0,650		Valid
	Akuntabilitas	AK1		0,789
AK10		0,661	Valid	
AK2		0,846	Valid	
AK3		0,873	Valid	
AK4		0,818	Valid	
AK5		0,769	Valid	
AK6		0,823	Valid	
AK7		0,828	Valid	
AK8		0,784	Valid	
AK9		0,738	Valid	
	KOM * Tingkat Pendidikan	1,113	1,000	Valid

### 3. Nilai Cross Loading

	AK	KOM	Moderating Effect 1	PLK	SKS	SPI	Tingkat Pendidikan
AK1	0,789	0,644	0,036	0,490	0,469	0,570	0,099
AK10	0,661	0,497	-0,100	0,417	0,359	0,494	0,131
AK2	0,846	0,576	0,052	0,519	0,443	0,602	0,152
AK3	0,873	0,633	-0,045	0,507	0,406	0,614	0,112
AK4	0,818	0,599	0,016	0,451	0,388	0,551	0,117
AK5	0,768	0,504	-0,005	0,526	0,383	0,591	0,049
AK6	0,823	0,566	-0,019	0,419	0,456	0,563	0,167
AK7	0,828	0,590	-0,098	0,506	0,446	0,588	0,138
AK8	0,784	0,578	-0,077	0,566	0,478	0,566	0,107
AK9	0,738	0,519	-0,054	0,474	0,502	0,434	0,095
KOM * Tingkat Pendidikan	-0,035	-0,153	1,000	-0,029	0,012	-0,025	-0,106
KOM1	0,625	0,761	-0,025	0,529	0,549	0,501	0,065



KOM10	0,502	0,691	-0,307	0,434	0,284	0,536	0,233
KOM2	0,575	0,804	0,025	0,504	0,478	0,541	0,078
KOM3	0,490	0,720	-0,173	0,411	0,498	0,446	0,247
KOM4	0,388	0,654	-0,177	0,404	0,358	0,462	0,162
KOM7	0,399	0,654	-0,193	0,382	0,217	0,431	0,183
KOM8	0,417	0,700	-0,149	0,416	0,330	0,439	0,124
KOM9	0,660	0,781	-0,006	0,566	0,411	0,629	0,110
PLK1	0,371	0,415	-0,063	0,693	0,349	0,561	0,043
PLK11	0,450	0,508	-0,032	0,751	0,627	0,520	0,025
PLK12	0,425	0,471	0,022	0,795	0,510	0,576	-0,059
PLK2	0,540	0,509	-0,011	0,793	0,481	0,678	0,024
PLK3	0,496	0,461	-0,030	0,802	0,425	0,606	-0,013
PLK4	0,421	0,439	0,020	0,825	0,437	0,567	-0,063
PLK6	0,432	0,561	0,001	0,736	0,475	0,510	-0,008
PLK7	0,383	0,450	-0,078	0,608	0,437	0,491	-0,005
PLK8	0,538	0,564	-0,005	0,792	0,495	0,589	0,014
PLK9	0,563	0,497	-0,053	0,816	0,623	0,594	0,036
SKS1	0,363	0,344	0,002	0,243	0,669	0,217	0,140
SKS10	0,518	0,492	0,007	0,612	0,797	0,508	0,103
SKS2	0,476	0,484	0,001	0,585	0,834	0,501	0,146
SKS3	0,498	0,454	0,030	0,481	0,833	0,387	0,169
SKS4	0,421	0,468	0,062	0,565	0,800	0,362	0,115
SKS5	0,196	0,209	0,008	0,274	0,639	0,154	0,079
SKS6	0,384	0,404	-0,025	0,592	0,793	0,403	0,078
SKS7	0,312	0,287	-0,001	0,319	0,662	0,228	0,076
SKS8	0,369	0,408	-0,015	0,510	0,807	0,367	0,049
SKS9	0,497	0,560	0,014	0,592	0,838	0,501	0,056
SPI10	0,484	0,475	0,072	0,592	0,273	0,723	0,122
SPI11	0,544	0,481	-0,009	0,557	0,369	0,734	0,128
SPI12	0,454	0,469	-0,020	0,510	0,317	0,697	0,044
SPI13	0,502	0,463	0,011	0,565	0,435	0,700	0,090
SPI14	0,555	0,553	-0,042	0,505	0,357	0,643	0,087
SPI2	0,602	0,586	0,001	0,624	0,359	0,780	0,065
SPI3	0,520	0,592	-0,216	0,583	0,367	0,730	0,101
SPI4	0,408	0,517	-0,172	0,482	0,256	0,717	0,104
SPI5	0,390	0,366	0,038	0,534	0,326	0,690	0,076
SPI6	0,469	0,476	-0,045	0,476	0,431	0,705	0,061
SPI7	0,508	0,470	0,025	0,496	0,398	0,734	0,050
SPI8	0,617	0,528	0,088	0,554	0,404	0,794	0,184
SPI9	0,399	0,463	0,003	0,471	0,297	0,653	0,101
Tingkat pendidikan	0,147	0,197	-0,106	0,001	0,134	0,132	1,000
Sumber: Data diolah (2022)							

#### 4. Nilai HTMT

	AK	KOM	MOD	PLK	SKS	SPI	Tingkat Pendidikan
AK							
KOM	0,777						
Moderating Effect 1	0,066	0,196					
PLK	0,655	0,704	0,043				
SKS	0,565	0,581	0,022	0,669			
SPI	0,746	0,765	0,083	0,810	0,508		
Tingkat Pendidikan	0,152	0,223	0,106	0,040	0,137	0,136	

Sumber: Data diolah (2022)

#### 5. Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
AK	0,934	0,945
KOM	0,870	0,897
Moderating Effect 1	1,000	1,000
PLK	0,920	0,933
SKS	0,924	0,935
SPI	0,921	0,932
Tingkat Pendidikan	1,000	1,000

Sumber: Data diolah (2022)

#### 6. Pengujian Koefisien Determinasi

	R Square
AK	0,615

Sumber: Data diolah (2022)

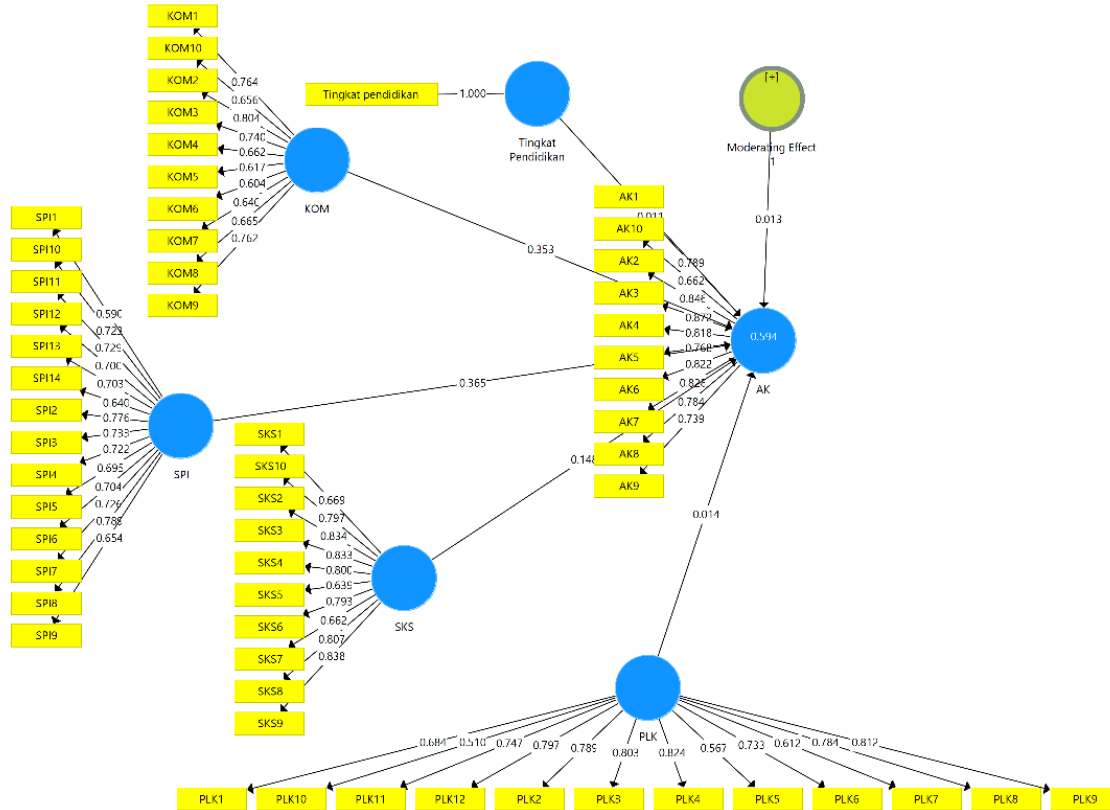
#### 7. Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	T-statistics	P values	Keterangan
KOM -> AK	0,394	4,058	0,000	Diterima
Moderating Effect 1 -> AK	0,029	0,681	0,496	Ditolak
PLK -> AK	0,003	0,033	0,974	Ditolak
SKS -> AK	0,147	1,672	0,095	Ditolak
SPI -> AK	0,354	3,846	0,000	Diterima

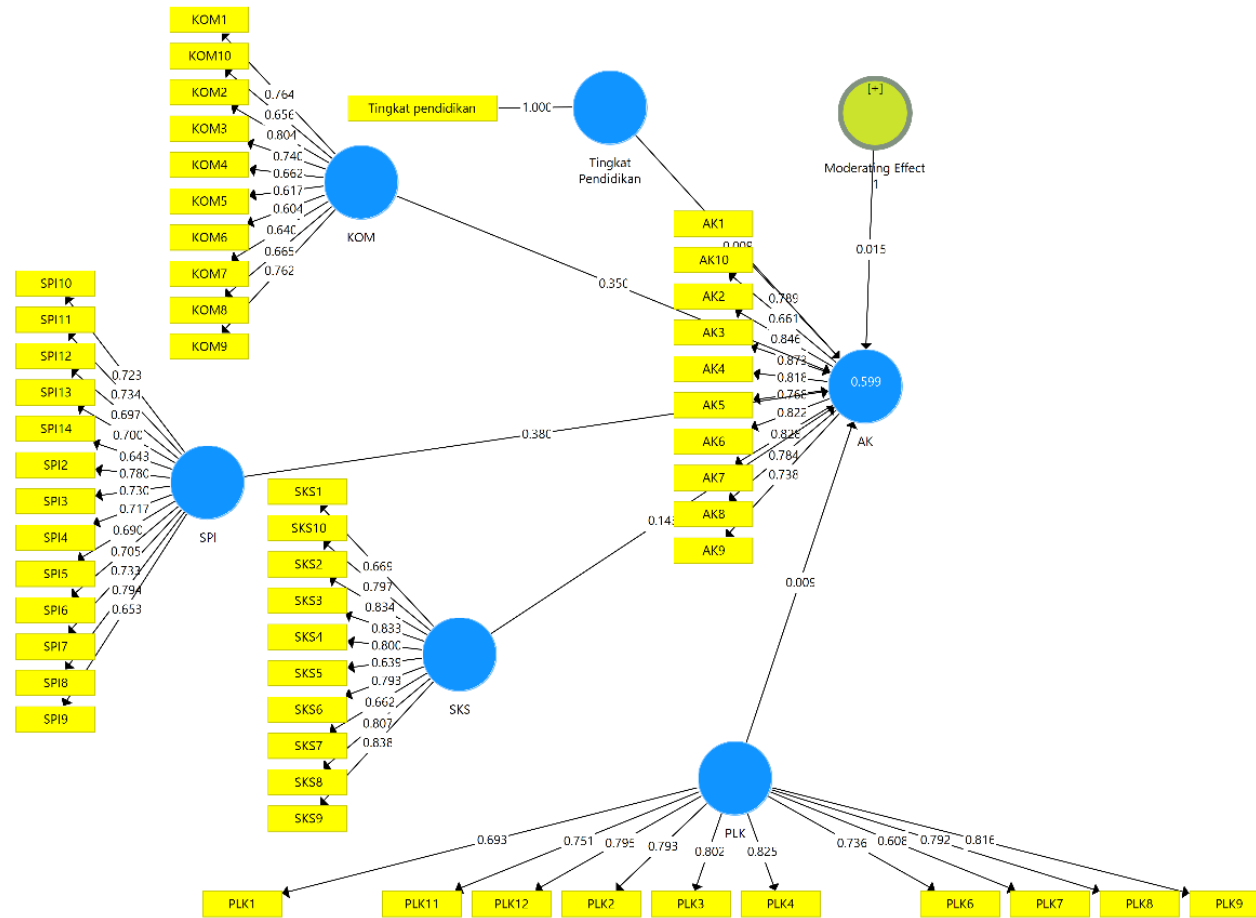
Sumber: Data diolah (2022)

Lampiran 10 Gambar Pengujian

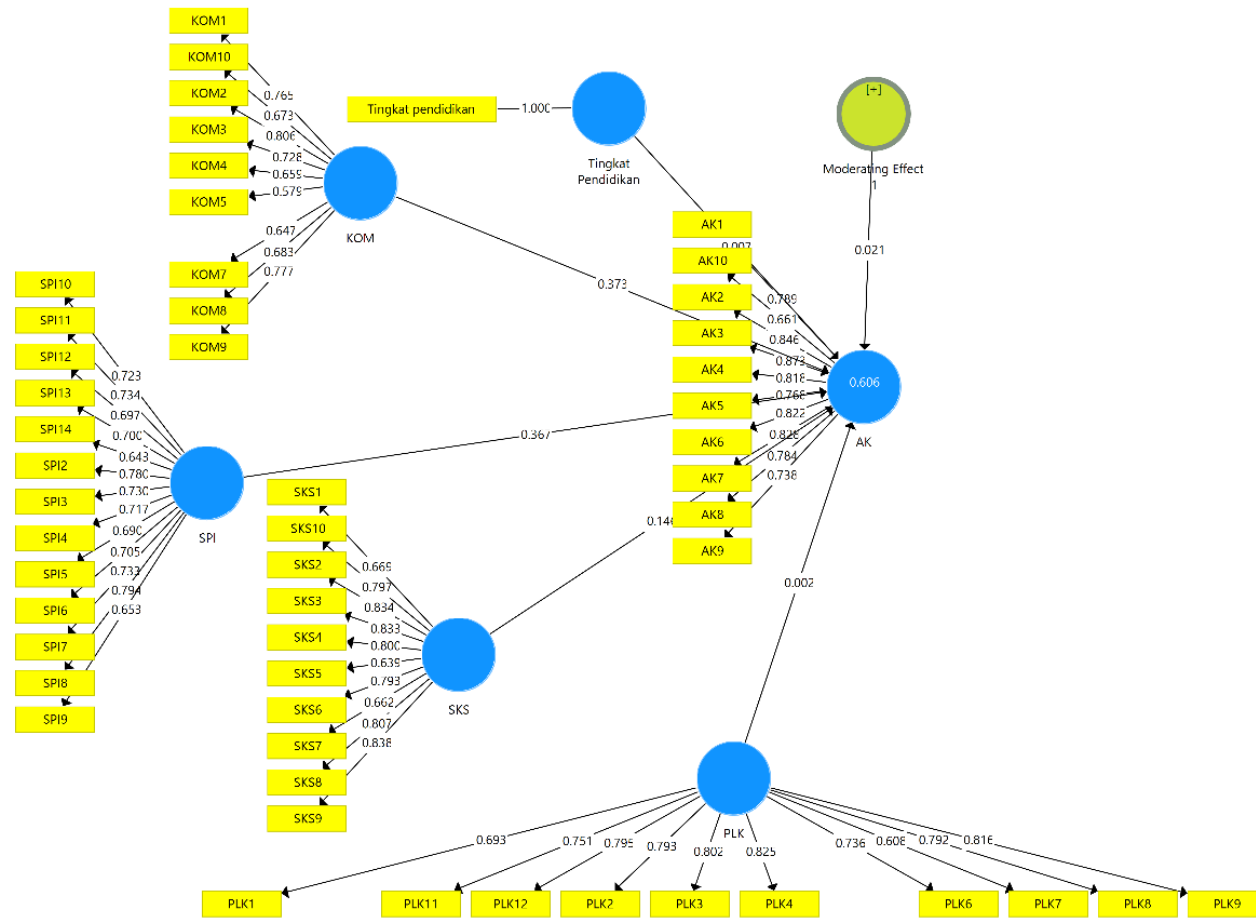
1. PENGUJIAN VALIDITAS TAHAP 1



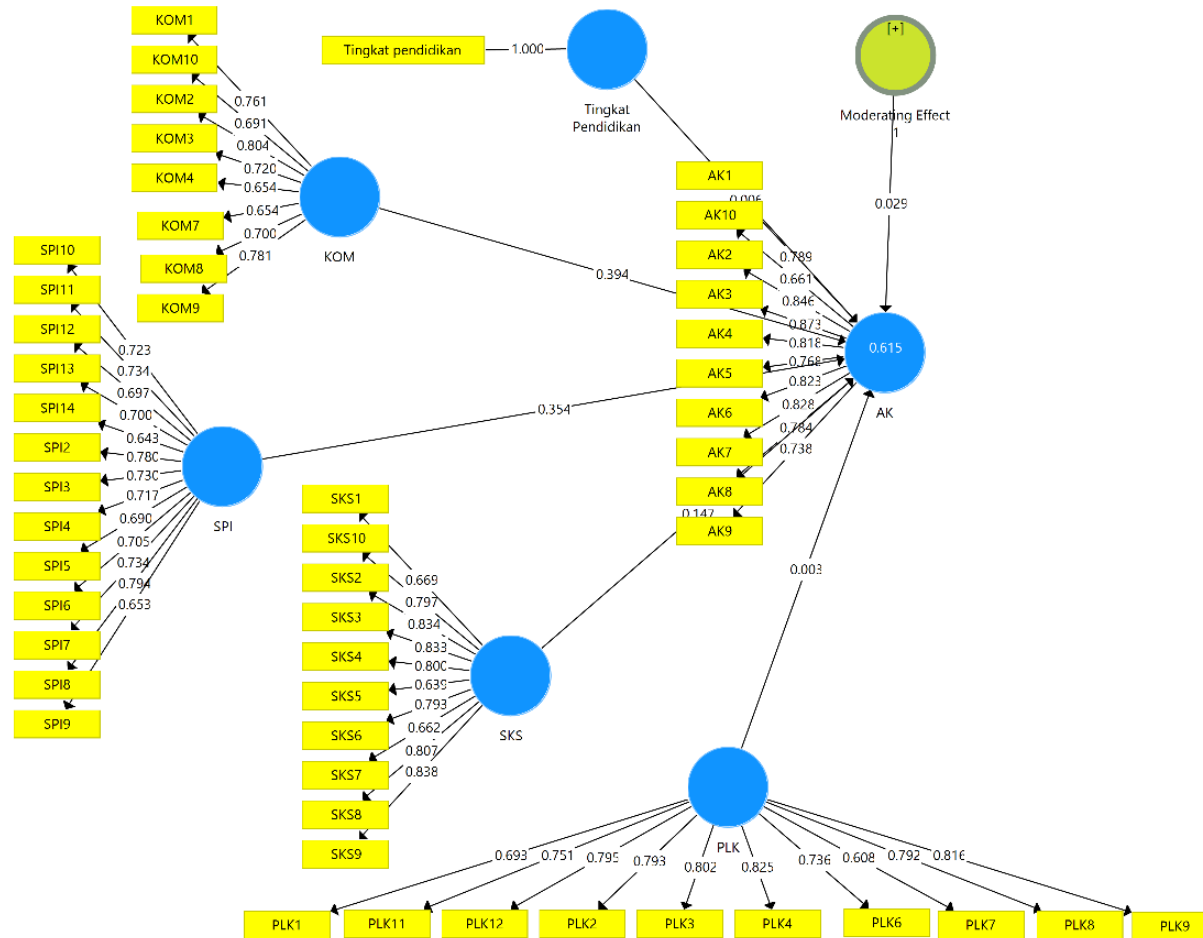
2. PENGUJIAN VALIDITAS TAHAP KEDUA



### 3. PENGUJIAN VALIDITAS TAHAP KETIGA



4. PENGUJIAN VALIDITAS TAHAP KEEMPAT



### 5. PENGUJIAN HIPOTESIS

